

**Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan
Sosial untuk Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Program Studi Ilmu Politik



Oleh:

Silfa Maharani

1906016025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Silfa Maharani

NIM : 1906016025

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial untuk Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2023

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN POLITIK PKK DALAM MENGADVOKASI PROGRAM
KETAHANAN SOSIAL UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DI
DESA CILEUNGI, KECAMATAN CILEUNGI, KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh:

Silfa Maharani


1906016025

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal
20 Desember 2023 dan telah dinyatakan lulus.

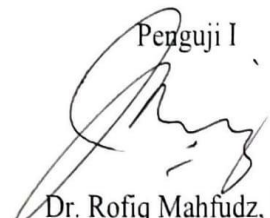
Susunan Dewan Penguji


Ketua
Prof. Dr. H. M. Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001


Sekretaris


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji I


Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si
NIP. 197303052023211007

Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Silfa Maharani menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial untuk Perempuan dan Anak-anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 6 Desember 2023



Silfa Maharani

1906016025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial untuk Perempuan dan Anak-anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan risalah-Nya membimbing umat menuju jalan kebenaran.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran serta banyak pihak yang terlibat, yang dengan ikhlas memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan, dan sekaligus menjadi sumber motivasi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang juga telah memberikan pengetahuan, arahan, dan sekaligus menjadi sumber motivasi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, dorongan, dan arahan yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Bapak telah menjadi sumber inspirasi dan penuntun yang tak ternilai, membimbing saya melalui setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian. Semua kontribusi dari Bapak sangat berarti bagi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasinya.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama berproses di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap jajaran Tenaga Pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administrasi sehingga membantu penulis dalam memperlancar penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Yusep Yasmin dan Ibu Martini. Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua insan luar biasa ini yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa restu dalam setiap langkah hidup penulis. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa syukur dan cinta kepadanya. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa-doa yang tak pernah putus, serta kebijaksanaan yang telah menjadi cahaya penerang dalam perjalanan hidup penulis. Kebersamaan, semangat, dan dorongan

dari kedua orang tua yang telah menjadi kekuatan sejati bagi penyelesaian skripsi ini. Setiap langkah yang diambil penulis adalah langkah yang didukung dengan sepenuh hati dari kedua orang tua penulis. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan penulis, motivasi dalam setiap tantangan, dan tempat kembali yang penuh cinta. Terima kasih telah mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, dan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar setiap usaha. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan tanpa pamrih, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga skripsi ini bisa menjadi suatu wujud kecil penghormatan penulis kepada kalian berdua yang telah menjadikan impian ini mungkin terwujud. Dan tak lupa juga terima kasih penulis ucapkan kepada kedua adik penulis yaitu Bayu Kamilah Yasmin dan juga Syarfa Zahra Yasmin, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini. Dukungan dan kehadirannya membawa kebahagiaan, dan semuanya menjadi lebih berarti berkat kehadirannya. Terima kasih, atas cinta dan dukungan kalian yang tak tergantikan. Dan tak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Alm. Bapak Neneng Yasin dan juga Keluarga Besar Bapak Maridi, yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada penulis.

8. Bapak H. Beni Sopian selaku Kepala Desa Cileungsi dan juga Bapak Supendi selaku Sekretaris Desa Cileungsi beserta jajaran Perangkat Desa Cileungsi yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap anggota PKK Desa Cileungsi, terutama Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi, yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Segenap informan pendukung yang turut memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman dekat penulis yaitu Cantika, terima kasih telah bersedia kebersamai penulis selama 10 tahun ini dalam keadaan suka maupun duka, terima kasih pula penulis ucapkan kepada Fikry Zainul Umam. Terima kasih atas segala waktu, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih juga telah bersedia untuk menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
12. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan yaitu Fauziah Noor Rahmani, Nabila Rizqi Aenur Rianto, dan Yustian Dwi Hambali terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan di perantauan, terima kasih telah memberikan semangat, kasih sayang, dan canda serta tawa untuk penulis.
13. Teman-teman KKN MIT DR Ke-14 Kelompok 17 Tahun 2022, yaitu Rifo Mahendra, Fauziah Noor Rahmani, Amadha Gita Firdaus, Nabila Rizqi Aenur Rianto, Ida Fitriia Salsabila, Fina Qutrunnada, Nastaufika Firdausy, Elviana Feby, Maziya Rosyada, Sofarul Wildan Akhmad, Muhammad Nawa Syarif, Fikry Zainul Umam, dan Rifqi Muhibudin yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga pada saat mengabdikan di Kota Temanggung.
14. Anggota SEMA Fisip UIN Walisongo Semarang beserta Tenaga Ahli Tahun 2022 yang telah memberikan ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk berproses, berkembang, dan berorganisasi sehingga memberikan pengalaman kepada penulis dalam berorganisasi.
15. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

16. Terakhir yang tak kalah penting, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah mau bertahan sejauh ini, terima kasih untuk tidak memilih menyerah dan terus berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk ketekunan, kesabaran, dan semangat yang telah ditanamkan dalam setiap langkah. Terima kasih atas kegigihan untuk terus melangkah, bahkan ketika tantangan terasa begitu berat. Anda telah menjadi penyemangat dan pionir dalam meraih pencapaian ini. Semoga keberhasilan menyelesaikan skripsi ini menjadi momentum bagi langkah-langkah yang lebih besar di masa depan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis meletakkan harapan besar semoga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Sekian, *Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,

Silfa Maharani

1906016025

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala syukur yang dipanjatkan kepada Allah SWT

Tuhan Yang Maha Esa

Saya persembahkan skripsi saya ini untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Yusep Yasmin dan Ibu Martini yang telah membesarkan dan mendidik saya, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa restu dalam setiap langkah hidup saya.

MOTTO

*“Karena tidak semua hal di bumi bisa menyenangkan,
jadi yang menyakitkan, relakan”*

(Tsana)

*“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu.
Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu”*

(B.J. Habibie)

ABSTRAK

Ketahanan sosial merujuk pada kemampuan kelompok atau masyarakat untuk bertahan dari gangguan yang berasal dari luar atau perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang dapat mengubah struktur sosial atau tatanan masyarakat. Di tingkat desa, salah satu aktor yang memiliki peran di dalam pengembangan membangun ketahanan sosial adalah PKK. Studi ini mengkaji tentang peran politik PKK dalam mengadvokasi program ketahanan sosial untuk perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi; 2) Bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi; 3) Bagaimana dampak dari advokasi yang dilakukan oleh PKK terhadap kondisi ketahanan sosial perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori Ketahanan Sosial menurut Keck dan Sakdalporak untuk menjawab apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi dan teori Advokasi Politik menurut Richey dan Taylor untuk menjawab bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan studi lapangan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, serta studi dokumen dan literatur. Hasil dari penelitian ini PKK Desa Cileungsi memiliki aspirasi dalam tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program-program seperti Paaredi, pembentukan PAUD, sosialisasi Gemar Membaca, Cinta Kasih, pembentukan ketahanan pangan, penyuluhan B2SA, pelatihan kader posyandu, gotong royong, pemeriksaan IVA Test, pembinaan UP2K, pelatihan pengelolaan UMKM, dan pelatihan perempuan menjadi bagian dari strategi PKK untuk mengadvokasi ketahanan sosial di Desa Cileungsi. PKK Desa Cileungsi menerapkan strategi *political advocacy* dengan memperjuangkan programnya melalui jalur formal dan informal, seperti musyawarah desa (musdes) sebagai jalur formal, serta menjalin komunikasi langsung dengan perangkat desa sebagai jalur informal. Dampak dari advokasi program ketahanan sosial PKK Desa Cileungsi belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan, karena masih ada beberapa program yang memang belum berjalan optimal seperti program Paaredi dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah karena beberapa hambatan seperti sikap acuh dan kurangnya pemahaman terhadap program PKK.

Kata Kunci: PKK, Advokasi Politik, Ketahanan Sosial, Perempuan dan Anak-Anak.

ABSTRACT

Social resilience refers to the ability of a group or community to survive external disturbances or social, economic, political, and environmental changes, which can change the social structure or order of society. At the village level, one of the actors that has a role in the development of building social resilience is the PKK. This study examines the political role of PKK in advocating social resilience programs for women and children in Cileungsi Village. The problem formulations in this study are, 1) What aspirations of women and children are the focus of PKK's attention in Cileungsi Village; 2) How does the PKK advocate these aspirations to build social resilience for women and children in Cileungsi Village; 3) What is the impact of the advocacy carried out by the PKK on the condition of social resilience of women and children in Cileungsi Village. In answering the research questions, the data that has been obtained is then analyzed using the Social Resilience theory according to Keck and Sakdalporak to answer what aspirations of women and children are the focus of PKK's attention in Cileungsi Village and the Political Advocacy theory according to Richey and Taylor to answer how PKK advocates these aspirations to build social resilience for women and children in Cileungsi Village. In this research, the type of research used is a field study with qualitative methods using a case study approach. This research data collection using several techniques, namely interviews, observations, and document and literature studies. The results of this study show that the Cileungsi Village PKK has aspirations in three main aspects: education, health, and economy. Programs such as Paaredi, PAUD establishment, Gemar Membaca socialization, Cinta Kasih, food security establishment, B2SA counseling, posyandu cadre training, gotong royong, IVA Test examination, UP2K coaching, UMKM management training, and women's training are part of the PKK strategy to advocate for social resilience in Cileungsi Village. PKK Cileungsi Village applies a political advocacy strategy by fighting for its programs through formal and informal channels, such as village deliberations (musdes) as a formal channel, and establishing direct communication with village officials as an informal channel. The impact of PKK Cileungsi Village's social resilience program advocacy has not been well felt, because there are still several programs that have not run optimally such as the Paaredi program and also the level of community participation is still low due to several obstacles such as indifference and lack of understanding of PKK programs.

Keywords: *PKK, Political Advocacy, Social Resilience, Women and Children.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Kajian PKK.....	6
2. Kajian Ketahanan Sosial.....	14

F.	Kerangka Teori.....	21
1.	Teori Penelitian.....	21
a.	Ketahanan Sosial.....	21
b.	Advokasi Politik	22
G.	Metode Penelitian.....	24
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2.	Sumber dan Jenis Data.....	25
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
4.	Teknik Analisis Data	27
H.	Sistematika Penulisan.....	28
	BAB I: Pendahuluan	28
	BAB II: Kerangka Teori.....	28
	BAB III: Lanskap Desa Cileungsi dan PKK Desa Cileungsi	28
	BAB IV: Aspirasi dan Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial bagi Perempuan dan Anak-Anak.....	29
	BAB V: Dampak Advokasi PKK terhadap Kondisi Ketahanan Sosial Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi	29
	BAB VI: Penutup	29
	BAB II.....	30
	KERANGKA TEORI	30
A.	Definisi Konseptual	30
1.	Advokasi	30
2.	Peran Politik.....	31
3.	Ketahanan Sosial.....	33
4.	PKK	34

B.	Teori Penelitian	37
1.	Ketahanan Sosial.....	37
2.	Advokasi Politik	42
BAB III	48
LANDSKAP DESA CILEUNGSI DAN PKK	48
A.	Landskap Desa Cileungsi	48
1.	Sejarah Desa Cileungsi	48
2.	Kondisi Geografis Desa Cileungsi.....	50
3.	Kondisi Demografi Desa Cileungsi	52
4.	Keadaan Sosial dan Ekonomi	54
5.	Kondisi Politik dan Pemerintahan	59
B.	PKK.....	63
1.	Sejarah PKK	63
2.	Struktur Organisasi PKK Desa Cileungsi.....	65
3.	Visi dan Misi PKK Desa Cileungsi	66
4.	Tugas dan Fungsi PKK.....	66
BAB IV	68
ASPIRASI DAN PERAN POLITIK PKK DALAM MENGADVOKASI PROGRAM KETAHANAN SOSIAL UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK	68
A.	Aspirasi PKK Desa Cileungsi	68
1.	Permasalahan Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi	68
2.	Program PKK Desa Cileungsi	72
a.	Aspek Pendidikan	72
b.	Aspek Kesehatan.....	80

c. Aspek Pemberdayaan Ekonomi.....	87
B. Strategi PKK dalam Advokasi	93
BAB V.....	107
DAMPAK ADVOKASI PKK TERHADAP PROGRAM	107
KETAHANAN SOSIAL.....	107
1. Aspek Pendidikan dan Kesehatan	108
2. Pemberdayaan Perempuan dalam Bingkai Pertumbuhan Ekonomi Desa	110
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat	111
BAB VI.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Wilayah Desa Cileungsi.....	51
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Cileungsi 2022.....	52
Tabel 3. 3 Usia Penduduk Desa Cileungsi 2022	52
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cileungsi 2022.....	53
Tabel 3. 5 Jenis Kesejahteraan Keluarga Desa Cileungsi	54
Tabel 3. 6 Jumlah Murid dan Guru Desa Cileungsi.....	55
Tabel 3. 7 Jumlah Gedung Pendidikan Desa Cileungsi	55
Tabel 3. 8 Sarana Kesehatan Desa Cileungsi.....	56
Tabel 3. 9 Sarana Peribadatan Desa Cileungsi.....	57
Tabel 3. 10 Sarana Olahraga Desa Cileungsi.....	57
Tabel 3. 11 Mata Pencaharian Penduduk Desa Cileungsi.....	58
Tabel 3. 12 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cileungsi.....	59
Tabel 3. 13 Struktur Anggota BPD Desa Cileungsi.....	60
Tabel 3.14 Nama-Nama Kepemimpinan Desa Cileungsi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Cileungsi.....	50
Gambar 4. 1 PAUD Binaan PKK.....	76
Gambar 4. 2 Sosialisasi Cinta Kasih.....	79
Gambar 4. 3 Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Cileungsi	80
Gambar 4. 4 Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	83
Gambar 4. 5 Kegiatan Penyuluhan IVA Test.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan sosial merujuk pada kemampuan kelompok atau masyarakat untuk bertahan dari gangguan yang berasal dari luar atau perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang dapat mengubah struktur sosial atau tatanan masyarakat (Adger, 2000). Di tingkat desa, salah satu aktor yang memiliki peran di dalam pengembangan juga membangun ketahanan sosial adalah PKK, terkhusus bagi perempuan. PKK merupakan kelompok sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan di Indonesia. Gerakan PKK merupakan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan peran penting perempuan dalam menggerakkan dan menginspirasi gerakan tersebut, dengan maksud tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemandirian keluarga (Putri dan Jatiningsih, 2020).

Peran diartikan sebagai kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu. Harapan dari peran adalah seseorang dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam posisi tertentu (Lantaeda, 2017) . Peran apabila dilihat dari sudut pandang “*role theory*” adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi (Sarwono, 2015). Maka peran politik dapat diartikan sebagai tindakan seseorang sesuai kewenangannya dalam hal kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut dapat diarahkan untuk kebaikan bersama.

Peran penting perempuan dalam PKK sebagai organisasi yang ada di masyarakat menjadikan perempuan sebagai aktor yang memiliki kekuatan politik. Kekuatan politik tersebut diwujudkan melalui peran perempuan dalam menyampaikan aspirasi sebagai hak politik untuk menyampaikan pendapat. Selama PKK memiliki aspirasi untuk kepentingan bersama, maka PKK juga memiliki peran politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana peran politik PKK dalam pengembangan ketahanan sosial. Studi ini tidak baru karena telah ada beberapa peneliti yang melakukan riset terkait studi ini, baik studi mengenai peran PKK, maupun studi mengenai ketahanan sosial.

Penelitian tentang PKK telah banyak dilakukan para sarjana lain. Sebagian sarjana melakukan penelitian tersebut dengan lebih memfokuskan terhadap segi ekonomi, partisipasi dalam pembangunan, serta mendukung program-program pemerintahan. Kajian dari (Putri & Jatiningsih, (2020), Hidayah, dkk, (2021), Salfiah (2013), Hanis & Mazaman (2020), dan Tadanugi (2020)). Studi tersebut menemukan bahwa gerakan PKK merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan peran penting perempuan dalam menggerakkan dan menginspirasi gerakan tersebut, dengan maksud tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Gerakan ini memfokuskan pada peningkatan mutu perempuan lewat program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan serta memanfaatkan potensi perempuan.

Adapun studi lain yang juga mengkaji tentang ketahanan sosial, diantaranya dilakukan oleh (Ghafur (2018), Andayani, dkk. (2017), Wulandari (2022), Alie dan Elanda (2019), Stevany Afrizal, dkk (2020)). Kajian tersebut lebih menitikberatkan terhadap upaya masyarakat dalam segi ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga, dan sosial-budaya. Kajian tersebut menemukan bahwa ketahanan sosial tidak hanya tentang kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup, namun juga tentang

perubahan pada masyarakat yang lebih baik. Selain itu, ketahanan sosial ditunjukkan dengan adanya kesejahteraan masyarakat dalam hal terdapat peningkatan di pemberdayaan ekonomi dan meningkatnya keterampilan sebagai faktor penentu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan sosial dalam keluarga diperjuangkan pula oleh perempuan terutama disaat pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan pembacaan penulis terhadap kajian-kajian tersebut belum banyak mengkaji tentang bagaimana peran politik PKK dalam ketahanan sosial. Dalam hal ini, anak dan perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi (Antara News, 2018). Oleh karena itu, program ketahanan sosial sangat penting bagi kelompok ini. Dalam hal ini, PKK sebagai organisasi masyarakat yang berbasis keluarga memiliki peran strategis dalam mengadvokasi program-program ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji tema ini untuk memperkaya studi yang ada. Kajian ini dilakukan di Desa Cileungsi.

Desa Cileungsi berdekatan dengan ibukota sehingga permasalahan yang dihadapi cukup kompleks. Contoh permasalahan yang terjadi di Desa Cileungsi melibatkan anak-anak sebagai subjek konflik seperti halnya kenakalan remaja. Lain halnya juga dengan perempuan yang menghadapi tantangan lebih kompleks, masih banyak orang yang menganggap perempuan sebelah mata dan banyak pula perempuan yang masih bergantung kepada suami. Diketahui, struktur pemerintahan Desa Cileungsi masih didominasi oleh laki-laki, baik dari perangkat desa ataupun BPD. Oleh sebab itu, maka PKK sangat mungkin menjadi satu-satunya institusi bagi perwujudan politik perempuan di Desa Cileungsi. Visi dan misi PKK Desa Cileungsi ialah ingin mengembangkan bangga kencana, serta mengajak wanita-wanita di Desa Cileungsi untuk berkembang sesuai kemajuan zaman dengan berkembangnya teknologi. Adapun untuk mewujudkannya, PKK Desa Cileungsi mengadakan penyuluhan, pembinaan, latihan keterampilan, dan sosialisasi ke PKK

tingkat RT dan juga RW sesuai dengan pokja masing-masing. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh PKK di Desa Cileungsi untuk menunjang pemberdayaan dan kemandirian perempuan disana, salah satunya dengan mengadakan pelatihan perempuan. Selain perempuan, adapun fokus lain dari program yang dijalankan oleh PKK Desa Cileungsi ialah program untuk anak-anaknya. Mengingat Desa Cileungsi yang berdekatan dengan ibukota, sehingga memungkinkan terjadinya kenakalan remaja. Oleh sebab itu, PKK Desa Cileungsi mengadakan program terkait, seperti halnya dengan mengadakan penyuluhan maupun pembinaan kepada remaja disana mengenai kenakalan remaja dan juga dengan mengadakan PAUD untuk anak usia dini. Mengingat, untuk membentuk anak agar memiliki karakter yang baik, dibutuhkan untuk melakukan pendidikan karakter sedini mungkin.

Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu pasti adanya peran politik dari PKK. Peran politik PKK disini dilihat dari bagaimana perjuangan dan proses PKK untuk mengadvokasikan program-program tersebut. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana peran politik PKK Desa Cileungsi dalam mengadvokasi program ketahanan sosial untuk perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan pemahaman, mendorong kebijakan yang berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong penyebaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat berkontribusi pada upaya penguatan ketahanan sosial tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini memfokuskan kajian pada tiga arena *pertama*, apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi. *Kedua*, Bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. *Ketiga*, bagaimana dampak dari advokasi yang dilakukan oleh PKK terhadap kondisi ketahanan sosial perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi?
2. Bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi?
3. Bagaimana dampak dari advokasi yang dilakukan oleh PKK terhadap kondisi ketahanan sosial perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari advokasi yang dilakukan oleh PKK terhadap kondisi ketahanan sosial perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dari penulisan laporan penelitian ini yakni manfaat penelitian teoritis maupun manfaat penelitian praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian mengenai peran politik dalam memperjuangkan hak-hak sosial masyarakat, terutama dalam konteks perjuangan gerakan sosial dan politik seperti PKK.
- b. Penelitian ini dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan metode penelitian dalam bidang politik dan sosial, terutama dalam mengkaji peran aktor politik dalam mempengaruhi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana peran PKK dalam meningkatkan ketahanan sosial khususnya untuk perempuan dan anak-anak.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam membangun ketahanan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang PKK sudah banyak dilakukan oleh sejumlah sarjana, dari penelusuran penulis terdapat khususnya terkait ketahanan keluarga. Penulis telah melakukan penelusuran ataupun penyelidikan terhadap sejumlah literatur. Dalam bagian ini, penulis akan menyajikan kajian literatur dengan membaginya ke dalam beberapa tema. Untuk itu, peneliti dalam hal ini membagi tema kajian dalam dua sub-bab. Diawali dengan tema kajian PKK, kemudian dilanjutkan dengan tema kajian mengenai ketahanan sosial. Untuk penjelasan lebih mendalam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kajian PKK

Penelitian yang membahas tentang PKK dibingkai dalam beberapa kasus yang berbeda. Diantaranya penelitian yang diteliti oleh (Putri & Jatningsih, (2020), Hidayah, dkk, (2021), Salfiah (2013), Hanis & Mazaman (2020), dan Tadanugi (2020)).

Kajian Citra Sandhika Putri & Oksiana Jatningsih, (2020), mengungkapkan bahwa peranan PKK dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dinilai dari empat indikator: 1) harapan, 2) norma, 3) wujud perilaku, dan 4) penilaian sanksi. Penulis menemukan bahwasanya di Lemah Putro, PKKnya memiliki peran penting sebagai peningkat dalam kemajuan perempuan di Desa Kwadengan Barat melalui penyuluhan, pembinaan, latihan keterampilan, sosialisasi, dan simulasi gender setiap bulan.

Kajian Asmi Ayuning Hidayah, dkk, (2021), mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam menjaga stabilitas rumah tangga semakin penting di tengah kehidupan yang semakin kompleks dan terkadang harus berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Perempuan dapat membantu ekonomi keluarga dengan berwirausaha. Kegiatan Gerakan PKK memperkuat betapa pentingnya prinsip pemberdayaan serta keikutsertaan masyarakat melalui upaya pemberdayaan keluarga. Tujuan dari Gerakan ini adalah untuk memahami serta menelaah peran dan juga partisipasi kader serta pengurus PKK dalam menciptakan sinergi dalam lingkungan masyarakat. Adapun indikator keberhasilan kader PKK dalam penilaian terkait efektivitas dan dampak dari program sosialisasi dan pelatihan ini ialah, efikasi diri, pengetahuan kewirausahaan, serta minat wirausaha.

Kajian Ramandita Salfiah (2013), mengungkapkan bahwa PKK memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kegiatan yang dilakukan di berbagai tingkatan seperti Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Organisasi PKK telah memberikan dorongan bagi program pembangunan dan pemerintahan di Kota Bontang melalui pembentukan 32 kelompok binaan pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut terdapat, 15 PKK yang aktif dalam kegiatan tersebut. Di Kota Bontang, PKKnya telah banyak memberi dukungan bagi pemerintah untuk menjalankan program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Kajian Nikma Wahyuni Hanis & Atika Mazaman (2020), mengungkapkan bahwa partisipasi yang aktif dan dukungan yang penuh dari pemerintah menjadi hal yang diperlukan dalam upaya pengembangan dan optimalisasi program PKK. Organisasi PKK mempunyai dua sisi yang berbeda dan bertentangan. Di satu sisi, PKK bertujuan untuk memerdekakan perempuan melalui pemberdayaan.

Namun, di sisi lain, PKK di Kecamatan Telaga hanya melakukan kegiatan rutin sebagai formalitas, sehingga peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat menjadi dipertanyakan. Dalam pemerintahan, organisasi PKK memiliki peran penting dan jika masalah yang dihadapi anggota PKK tidak ditangani dengan serius, sehingga hal ini akan mempengaruhi pembangunan bahkan hingga tingkat nasional.

Kajian Imanuel N. Tadanugi (2020), mengungkapkan bahwa PKK memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga memegang peran krusial sebagai entitas terkecil dalam dengan peran yang signifikan dalam mendukung program-program pemerintah untuk pembangunan. Diharapkan juga PKK dapat membebaskan wanita dari patriarki, dengan demikian wanita mendapatkan kemandirian dan harkat serta martabat yang lebih tinggi dalam keluarga. Akan tetapi, realitanya PKK masih belum mampu untuk sepenuhnya berupaya meningkatkan keadaan ekonomi keluarga dan juga wanita, sehingga membuat belum terwujudnya kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan gender.

Penelitian pertama oleh Citra Sandhika Putri & Oksiana Jatningsih, (2020) dengan judul *Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo*. Penulis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gerakan PKK merupakan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan peran penting perempuan dalam menggerakkan dan menginspirasi inisiatif tersebut, dengan maksud tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Gerakan ini memfokuskan pada peningkatan mutu perempuan lewat program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan serta memanfaatkan potensi perempuan. Penulis menemukan bahwasanya Kelurahan Lemah Putro, PKKnya memiliki peran penting untuk peningkatan kemajuan

perempuan di Desa Kwadengan Barat melalui penyuluhan, pembinaan, latihan keterampilan, sosialisasi, dan simulasi gender setiap bulan. PKK memberikan kontribusi positif bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi lebih aktif. Meski demikian, sebagian masyarakat di desa kurang aktif dan tidak mau berpartisipasi. Oleh karenanya hendaklah PKK untuk berusaha lebih keras agar masyarakat terutama perempuan di desa tersebut terlibat di PKK dan dapat memajukan desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo dinilai dari empat indikator: harapan, norma, wujud perilaku, dan penilaian sanksi. Indikator harapan mendapatkan skor kurang baik. Namun indikator norma tergolong cukup baik, hal ini karena adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup bergotong royong, solidaritas sosial, dan menjaga keamanan lingkungan. Pada indikator wujud perilaku tergolong cukup baik. Sedangkan indikator penilaian dan sanksi tergolong baik, dikarenakan memberikan penilaian positif maupun negatif terhadap perilaku serta mempertahankan nilai agar perilaku dalam peran diubah.

Penelitian kedua oleh Asmi Ayuning Hidayah, dkk, (2021) dengan judul *Peran Aktif Kader PKK Melalui Wirausaha Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga* yang diterbitkan oleh Jurnal Masyarakat Mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran serta kontribusi 20 kader dan pengurus PKK dalam memperkuat kerjasama yang harmonis di masyarakat Cilegon, khususnya Kecamatan Jombang. Peran perempuan dalam menjaga stabilitas rumah tangga semakin penting di tengah kehidupan yang semakin kompleks dan terkadang harus berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Menjadikan keluarga sejahtera memerlukan manajemen yang baik dalam kehidupan rumah tangga, dan ibu sebagai motor penggeraknya harus kreatif, sabar, ulet

dan tekun dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, seorang ibu dapat membantu ekonomi keluarga dengan berwirausaha. Kegiatan Gerakan PKK menitikberatkan pada prinsip pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui upaya pemberdayaan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran serta kontribusi 20 kader dan pengurus PKK dalam memperkuat kerjasama yang harmonis di masyarakat Cilegon, khususnya Kecamatan Jombang. Penelitian ini dilakukan di Kota Cilegon, Banten, khususnya di Kecamatan Jombang dengan jumlah peserta latihan sebanyak 20 Kader. Adapun indikator keberhasilan kader PKK dalam evaluasi terkait program sosialisasi dan pelatihan ini ialah: efikasi diri, pengetahuan kewirausahaan, serta minat wirausaha. Hasil yang dicapai dari penelitian ini pada indikator efikasi diri dari 20 Kader PKK didapati persentase sebanyak 15% yang menunjukkan bahwa kader PKK mampu menunjukkan identifikasi sebuah ide baru untuk memulai usaha baru, kemudian pada indikator kedua didapati persentase sebesar 9% dalam hal pengetahuan kewirausahaan kader PKK, yang terakhir didapati persentase sebesar 76% terhadap minat wirausaha para kader PKK yang muncul dari diri sendiri dan melihat dari kesuksesan orang lain. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebesar 92% dalam kontribusi pengurus dan kader PKK terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha, yang merupakan indikator dari upaya persiapan kader PKK dalam menghadapi tantangan ekonomi. Terdapat hasil lain yang signifikan, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh kader-kader PKK. Hal ini memberikan manfaat dalam mengatasi berbagai masalah yang dilalui di kehidupan sehari-hari, terutama pada pengembangan usaha dan peningkatan penghasilan keluarga bagi para kader PKK.

Penelitian ketiga oleh Ramandita Salfiah (2013) dengan judul *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang* yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan. Penulis menjelaskan bahwa PKK memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kegiatan yang dilakukan di berbagai tingkatan seperti Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Organisasi PKK telah memberikan dorongan bagi program pembangunan dan pemerintahan di Kota Bontang melalui pembentukan 32 kelompok binaan pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut terdapat, 15 PKK yang aktif dalam kegiatan tersebut. Selain itu, LSM juga turut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut dan jumlahnya mencapai 42 pada tahun 2010. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, kinerja fasilitator belum optimal untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang. Hal ini lantaran kontribusi masyarakat dalam berorganisasi masih minim, pemahaman masyarakat tentang peran penting PKK dalam keluarga masih minim, lalu perhatian dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai pada pelaksanaan kegiatan PKK masih minim. Namun, Penyuluh telah berhasil menjalankan perannya untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang dengan baik. Penyuluhan diadakan secara teratur dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan mendorong keluarga agar lebih responsif terhadap kondisi yang sedang terjadi. PKK Kota Bontang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemerintah untuk melaksanakan program-program di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Penelitian keempat oleh Nikma Wahyuni Hanis & Atika Mazaman (2020) dengan judul *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga* diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Administrasi. Pada riset ini, tujuannya ialah untuk memahami sejauh mana program PKK berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga. Organisasi PKK mempunyai dua sisi yang berbeda dan bertentangan. Di satu sisi, PKK bertujuan untuk memerdekakan perempuan melalui pemberdayaan. Namun, di sisi lain, PKK di Kecamatan Telaga hanya melakukan kegiatan rutin sebagai formalitas, sehingga peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat menjadi dipertanyakan. Dalam pemerintahan, organisasi PKK memiliki peran penting dan jika masalah yang dihadapi anggota PKK tidak ditangani dengan serius, sehingga hal ini akan mempengaruhi pembangunan bahkan hingga tingkat nasional. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan riset mengenai peran PKK serta program apa saja yang dijalankan di Kecamatan Telaga dalam pemberdayaan perempuan di sana. Peneliti ingin mengetahui bagaimana program-program tersebut dijalankan dengan keterbatasan SDM dan anggaran dana, sehingga PKK tetap menjadi organisasi yang dianggap penting. Dari hasil riset, dapat diamati bahwa program PKK telah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan di desa. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten Gorontalo pada PKK kecamatan hingga desa. Namun, pelaksanaan program PKK belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan utama yaitu keterbatasan kapasitas masyarakat, terutama perempuan, dan rendahnya penguasaan teknologi menjadi masalah yang dihadapi. Oleh karenanya partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan dan memaksimalkan program PKK.

Penelitian kelima oleh Imanuel N. Tadanugi (2020) dengan judul *Peranan PKK terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso* diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Administratie. Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami peran PKK dalam memengaruhi keadaan sosial dan ekonomi perempuan di Desa Bo'e. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa PKK memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemerintah untuk pembangunan. Diharapkan juga PKK dapat membebaskan wanita dari patriarki, dengan demikian wanita mendapatkan kemandirian dan harkat serta martabat yang lebih tinggi dalam keluarga. Akan tetapi, realitanya PKK masih belum mampu untuk sepenuhnya berupaya meningkatkan keadaan ekonomi keluarga dan juga wanita, sehingga membuat belum terwujudnya kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan gender. Kesenjangan ini menjadi alasan mengapa penelitian PKK di desa Bo'e, kecamatan Pamona Selatan, kabupaten Poso perlu dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat perbedaan antara PKK saat ini dengan periode sebelumnya di Desa Bo'e, Kecamatan Pamona Selatan. Banyak anggota PKK yang tidak aktif dalam berkontribusi dalam kelompok. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena kesibukan anggota PKK dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, masih rendahnya partisipasi wanita dalam melaksanakan program PKK, terutama dalam meningkatkan perekonomian keluarga, serta sistem rekrutmen yang tidak mempengaruhi minat ibu rumah tangga untuk bergabung dengan PKK. Selain itu, sosialisasi PKK di desa tersebut juga masih kurang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Bo'e. PKK juga berhasil melakukan pembinaan kepada ibu rumah tangga dan kaum perempuan

di desa tersebut. Namun, PKK belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Desa Bo'e. Meskipun demikian, PKK telah berhasil mengajak masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar peran PKK dalam melakukan pembinaan harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.

2. Kajian Ketahanan Sosial

Penelitian yang membahas tentang ketahanan sosial dibingkai dalam beberapa kasus yang berbeda. Diantaranya penelitian yang diteliti oleh (Ghafur, (2018), Andayani, dkk., (2017), Wulandari, dkk., 2022; Alie & Elanda, (2019), dan Afrizal, dkk, 2020)).

Kajian Ghafur (2018) mengungkap bahwa ketahanan sosial tak hanya tentang kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup, namun juga tentang perubahan pada masyarakat yang lebih baik. Ketahanan sosial pada wilayah perbatasan Sebatik dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan terintegrasi serta menjalin kerja sama perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia.

Kajian Andayani, dkk. (2017) menjelaskan bahwa ketahanan sosial budaya ditunjukkan dengan adanya kesejahteraan masyarakat dalam hal meningkatnya keberdayaan ekonomi dan meningkatnya keterampilan sebagai kualitas hidup masyarakat. Hal ini dilihat dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat desa wisata Penglipuran Bali yang berimplikasi pada ketahanan sosial budaya wilayah.

Kajian Wulandari (2022) mengungkapkan bahwa ketahanan sosial dalam keluarga diperjuangkan pula oleh perempuan. Subjek dari penelitian ini adalah perempuan pesisir yang menjalankan tiga peran (*triple burden*) berupa: reproduksi, peran produktif, dan peran sosial. Perempuan pesisir memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain karena berkembangnya peran perempuan pesisir karena ikut menopang ekonomi keluarga, perempuan pesisir juga memiliki kemandirian karena sudah terlatih dengan organisasi Sekolah Perempuan Puger Kreatif (SPPK).

Kajian Alie dan Elanda (2019) mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga dapat dicapai dengan tolak ukur apabila ketahanan ekonomi keluarga sudah terpenuhi. Perempuan dalam penelitian ini memiliki peran sebagai tulang punggung keluarga, sebagai mitra suami, serta sebagai pemberdaya dan agen perubahan.

Kajian oleh Stevany Afrizal, dkk (2020) mengungkapkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga khususnya selama pandemi Covid-19. Mayoritas perempuan di kampung Lemah Abang memiliki peran sebagai pekerja di sektor informal seperti sebagai asisten rumah tangga ataupun buruh lepas untuk membantu ketahanan keluarga khususnya selama masa pandemi Covid-19. Para perempuan cenderung memilih pekerjaan di sektor informal agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Penelitian pertama oleh Ghafur (2018) dengan judul *Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik* yang diterbitkan oleh Jurnal Masyarakat Indonesia. Penulis dalam penelitian melihat bahwa perbatasan merupakan daerah yang strategis dalam hal kedaulatan wilayah, maka pembangunan dalam daerah ini menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Pulau Sebatik memiliki batas wilayah darat dan perairan yang berdampingan dengan Malaysia. Penelitian ini menggambarkan tentang potensi sekaligus strategi dalam

pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan ketahanan sosial pada wilayah Sebatik. Ketahanan sosial dalam penelitian ini tak hanya dibatasi dengan kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup, namun juga didukung dengan perubahan pada masyarakat yang lebih baik. Beberapa potensi yang ada pada wilayah Sebatik berupa pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, dan sektor sumber daya alam nonhayati. Kondisi sumber daya alam yang melimpah ini tidak serta merta membuat masyarakat memiliki ketahanan masyarakat yang baik. Kenyataannya, wilayah Sebatik juga mengalami beberapa hambatan pada pengelolaan dan distribusi hasil perkebunan yang belum optimal, kurangnya sarana prasana penunjang hasil laut, dan minimnya riset dan peran pemerintah dalam hal potensi mineral di wilayah Sebatik. Dari segi sosial masyarakat, terdapat ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap negara tetangga karena aktivitas ekonomi yang lebih menguntungkan. Kondisi rentan ini dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan terintegrasi serta optimalisasi kerja sama perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia. Dua hal tersebut dapat menjadi faktor untuk bertumbuhnya ketahanan sosial masyarakat wilayah Sebatik.

Penelitian kedua oleh Andayani, dkk (2017) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)* yang diterbitkan oleh Jurnal Ketahanan Nasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Panglipuran serta dampaknya pada ketahanan sosial dan budaya pada wilayah tersebut. Penulis menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat yang diawali dengan persiapan berupa penyadaran masyarakat akan pentingnya kesadaran tentang sadar wisata; dilanjutkan dengan pengkapasitasan dari pemerintah dalam hal

bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan di bidang kepariwisataan kepada masyarakat; serta didukung dengan pemberian daya berupa bantuan dana pinjaman kepada kelompok masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui forum pengembangan desa wisata, kemudian dalam hal pelaksanaan yang melibatkan masyarakat dengan terlibat aktif dalam melayani pengunjung wisata, dan dalam hal evaluasi yang berupa keterbukaan hasil kegiatan kepada masyarakat Penglipuran. Pengembangan desa wisata ini juga dihiasi dengan kendala berupa sikap masyarakat yang acuh terhadap keputusan bersama, tidak terjaganya lingkungan, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten, akomodasi wisata yang belum optimal, dan kegiatan promosi yang belum maksimal. Ketahanan sosial budaya masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam hal keberdayaan ekonomi dan keterampilan sebagai kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang berproses sebelumnya kemudian memiliki implikasi terhadap ketahanan sosial budaya berupa: (1) terjadi pelestarian adat istiadat dan budaya, (2) perubahan cara hidup dan tata nilai masyarakat karena partisipasi warga dalam kegiatan sosial, (3) berdampak pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan, (4) menguatkan kehidupan beragama, dan (5) terjaganya nilai-nilai kekeluargaan melalui gotong royong.

Penelitian ketiga oleh Wulandari (2022) dengan judul *Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember* yang diterbitkan oleh Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peran perempuan pesisir dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Perempuan dalam riset ini adalah perempuan yang hidup di lingkungan nelayan atau selanjutnya disebut dengan

perempuan pesisir. Penulis mengungkapkan bahwa perempuan pesisir mempunyai tiga peran (*triple burden*) yakni: reproduksi, peran produktif, dan peran sosial.

Penulis mengartikan perempuan pesisir yang memiliki peran reproduktif sebagai ibu rumah tangga seperti halnya mengasuh anak dan mengelola pekerjaan rumah. Namun, dibalik peran reproduktif, perempuan pesisir juga dapat membantu ekonomi keluarga. Hal inilah yang kemudian diartikan sebagai peran produktif pada perempuan pesisir. Peran produktif dari perempuan pesisir dilatarbelakangi oleh para nelayan laki-laki yang mendapatkan hasil tak menentu karena faktor cuaca. Kemudian peran sosial perempuan pesisir dapat kita lihat pada keikutsertaannya pada kegiatan organisasi Sekolah Perempuan Puger Kreatif (SPPK). Perempuan pada akhirnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Karena dengan adanya SPPK, perempuan pesisir lebih percaya diri dalam bersosialisasi, tidak takut berhadapan dengan orang, dan berani mengambil keputusan.

Penelitian keempat oleh Alie dan Elanda (2019) dengan judul *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rangkut Surabaya)* yang diterbitkan oleh *Journal of Urban Sociology*. Tujuan riset ini ialah sebagai gambaran bagaimana perempuan berperan dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga di Kampung Kue. Diungkapkan pada riset ini bahwasanya perempuan berperan untuk pengembangan ekonomi keluarga, yang tidak hanya berdampak terhadap skala kecil keluarga, tetapi juga memberi pengaruh yang luas terhadap ketahanan keluarga di Kampung Kue. perempuan pada riset ini digambarkan sebagai tulang punggung keluarga, mitra suami, serta pemberdaya dan agen perubahan. Ketahanan keluarga dalam penelitian ini dapat dicapai dengan tolak ukur apabila ketahanan ekonomi keluarga sudah terpenuhi. Oleh karena itu menjadi relevan bahwa perempuan juga bergerak di bidang ekonomi untuk memperkuat ekonomi keluarga.

Penelitian kelima oleh Stevany Afrizal, dkk (2020) dengan judul *Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19*. Tujuan dari riset ini adalah menggambarkan dan mengkaji pentingnya peran perempuan pada ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19*, serta situasi dan kondisi yang timbul sebagai akibatnya. Penulis menjelaskan, dalam zaman modernisasi saat ini, melibatkan diri dalam pekerjaan sudah menjadi hal yang umum bagi perempuan dalam masyarakat. Dahulu, perempuan hanya terbatas pada peran domestik, namun saat ini perempuan banyak yang terlibat dalam sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masa kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri di luar rumah. Keterlibatan perempuan di dunia kerja mengharuskan mereka untuk memegang peran dan tanggung jawab ganda, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, perempuan perlu dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di era pandemi *Covid-19*, perempuan telah mencapai kesadaran tertinggi untuk berjuang. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan membangkitkan semangat keluarga. Tantangan yang dihadapi meliputi menjalankan peran domestik dan publik dari rumah, mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga, memastikan kecukupan pangan, dan menjaga Kesehatan mental keluarga.

Penulis menjelaskan bahwa mayoritas perempuan di Kampung Lemah Abang bekerja di sektor informal sebagai asisten rumah tangga atau buruh lepas untuk membantu ekonomi keluarga. Keputusan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian harga kebutuhan pokok, pendapatan suami yang tidak mencukupi, dan keterbatasan lapangan kerja. Para perempuan cenderung memilih pekerjaan di sektor informal agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, hal tersebut yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian untuk mengeksplorasi peran penting perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi dampak *Covid-19*.

Dari kajian-kajian yang telah dipaparkan di atas, belum banyak mengkaji tentang bagaimana peran politik PKK dalam ketahanan sosial. Dalam hal ini, PKK memiliki peran penting dalam mengadvokasi program ketahanan sosial bagi anak dan perempuan di Indonesia. Anak dan perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, program ketahanan sosial sangat penting bagi kelompok ini. Dalam hal ini, PKK sebagai organisasi masyarakat yang berbasis keluarga memiliki peran strategis dalam mengadvokasi program-program ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji tema ini untuk memperkaya studi yang ada. Kajian ini dilakukan di Desa Cileungsi. Alasan penulis memilih Desa Cileungsi sebagai lokasi penelitiannya ialah lantaran diketahui bahwasanya struktur pemerintahan Desa Cileungsi itu masih didominasi oleh laki-laki, baik dari perangkat desa ataupun BPD. Oleh sebab itu, maka PKK sangat mungkin menjadi satu-satunya institusi bagi perwujudan politik perempuan. Pada kajian ini hanya dibatasi untuk membahas peran PKK dalam mengadvokasi program ketahanan sosial untuk perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penelitian

a. Ketahanan Sosial

Konsep ketahanan sosial telah menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai konteks, termasuk dalam mitigasi bencana, ekologi, kesehatan, psikologi, dan kajian pembangunan sosial-ekonomi lainnya. Secara sederhana, konsep ketahanan sosial dapat dijelaskan sebagai kemampuan dalam menghadapi resiko yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik disekitarnya (Latifa, 2019). Secara umum, ketahanan sosial (*social resilience*) merujuk pada keadaan suatu negara yang mencerminkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan juga tantangan (Silahudin & Lestari, 2022).

Pada prinsipnya, berbagai konsep ketahanan telah diusulkan oleh para ahli, termasuk salah satunya *The Resilience Alliance* yang mendefinisikan ketahanan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari manusia dan alam yang terintegrasi yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengatasi gangguan yang muncul dalam sistem. Selain itu, ketahanan juga terlihat saat sistem dapat mengatur dan mengorganisir dirinya sendiri, serta ketika sistem dapat membangun dan meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dan beradaptasi (Carpenter, 2001).

Pfeifer, dkk (2013), menjelaskan bahwa ada empat aspek untuk mempelajari ketahanan sosial yang perlu diperhatikan, yaitu ancaman, kapasitas, faktor pendorong, dan hasil.

Menurut Bahransyaf & Probosiwi (2013), Konsep ketahanan sosial dibutuhkan masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperluas jaringan perlindungan sosial, keterlibatan masyarakat, pengendalian konflik, serta kebijaksanaan lokal dalam mengelola SDA serta SDM. Masyarakat akan mencapai ketahanan sosial jika terpenuhi kebutuhan akan

pelayanan sosial yang fleksibel, sensitif, dan menyeluruh, serta terbentuk dalam pengembangan sosial untuk setiap individu, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri secara otomatis dengan perubahan sosial yang terjadi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan hak asasi universal yang progresif.

Keck & Sakdapolrak (2013) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kemampuan entitas sosial, baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas untuk menanggulangi, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai ancaman lingkungan dan sosial. Pemahaman ketahanan sosial yang dijabarkan oleh Keck dan Sakdapolrak, yang menjelaskan bahwasanya ketahanan sosial terdiri dari tiga aspek diantaranya, *coping capacities*, *adaptive capacities*, dan juga *transformative capacities* dijadikan oleh penulis sebagai kerangka analisis pada penelitian ini. Penulis ingin menggunakan konsep ketahanan sosial yang dijelaskan oleh Keck dan Sakdapolrak untuk melihat apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus bagi PKK di Desa Cileungsi.

b. Advokasi Politik

Advokasi politik diartikan Richey dan Taylor (2021) sebagai jenis komunikasi politik tertentu dimana individu berusaha untuk merekomendasikan kandidat atau kebijakan pilihan mereka dalam diskusi dengan orang lain. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang yang belum berkomitmen. Para advokat akan mencoba meyakinkan orang lain untuk menjadi aktif, atau jika sudah aktif untuk meningkatkan tingkat dukungan mereka, atau bahkan berpindah pihak ketika mereka merasa bahwa ada peluang sah bagi kandidat pilihan mereka untuk menang.

Advokasi juga memiliki unsur keterlibatan yang lebih dalam daripada diskusi sederhana. Diskusi politik bisa saja bersifat dangkal atau sangat intens, namun diskusi tidak selalu dimaksudkan untuk mengadvokasi posisi, partai, atau kandidat yang diinginkan. Oleh karena itu, advokasi merupakan sebuah langkah melampaui diskusi menuju ranah komunikasi politik di mana konflik bisa saja terjadi. Advokasi politik dapat diartikan sebagai diskusi politik antarpribadi yang jauh lebih dalam dan berpotensi akan konflik. Hal ini juga dimaknai sebagai advokasi politik interpersonal dimana pelaku advokasi, sebagai diri sendiri, berusaha untuk terlibat dengan orang lain untuk mengubah pikiran mereka atau secara umum mempengaruhi mereka agar menganggap posisi pribadi pengadvokasi sebagai miliknya (Richey dan Taylor, 2021).

Pembahasan mengenai advokasi politik oleh Richey dan Taylor (2021) membawa kita menyelam lebih dalam pada pisau analisis yang disajikan dalam tiga lingkup. Mereka berteori bahwa terdapat pengaruh pada tingkat makro dari lingkungan kampanye, tingkat menengah yang terdiri dari komposisi jaringan sosial, dan tingkat mikro dari karakteristik individu, seperti kepentingan politik, keberpihakan negatif, dan ciri-ciri kepribadian. Mereka berpendapat bahwa ketiga hal tersebut saling berinteraksi, sehingga misalnya, seseorang yang memiliki kepentingan politik akan lebih cenderung melakukan advokasi dalam pemilu yang kompetitif dibandingkan pemilu yang nonkompetitif. Mengingat bahwa advokasi adalah perilaku yang berdampak pada tiga tingkatan, Richey dan Taylor menegaskan bahwa kondisi yang memprediksi advokasi adalah: (1) meningkatnya persaingan politik di tingkat makro, (2) karakteristik yang relevan dengan jaringan sosial seperti *social distance* dan homogenitas ideologi jaringan, dan (3) kepentingan dan keterlibatan politik, keberpihakan negatif, dan

kecenderungan berbasis kepribadian untuk terlibat secara terbuka di tingkat individu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun dalam riset ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi lapangan dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam bukunya yang berjudul *Research Design*, John W. Creswell memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk pendekatan yang digunakan individu ataupun kelompok orang tertentu yang dapat menggambarkan, menggali, dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pada penelitian ini melibatkan langkah-langkah penting, termasuk merumuskan pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data terkait dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang spesifik hingga tema-tema yang lebih umum, dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Struktur atau kerangka laporan akhir untuk penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan. Setiap orang yang terlibat dalam penelitian ini harus mengadopsi pendekatan penelitian yang bersifat induktif, menitikberatkan pada makna individual, dan mampu mengartikan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2013).

Creswell membagi jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif menjadi 5 bagian, yakni Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, Teori *Grounded*, dan Naratif. Adapun dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menginvestigasi dan memperoleh pemahaman mendalam tentang sebuah kejadian atau permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang kemudian dianalisis untuk mencari solusi yang dapat mengungkap dan mengatasi masalah. Adapun perbedaan utama antara

pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif lainnya, terletak pada tingkat kedalaman analisis yang lebih spesifik terhadap kasus tertentu. Metode ini sangat sesuai untuk menganalisis kejadian yang spesifik di lokasi dan waktu yang tertentu.

2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian melalui interaksi dengan responden menggunakan metode observasi, wawancara, dan distribusi angket. Fokus dari data primer adalah informasi yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Dengan menjelaskan hal ini, dapat dipahami bahwa pengumpulan data primer melibatkan interaksi atau komunikasi langsung antara peneliti dan sumber informasi. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah, Perangkat Desa Cileungsi, BPD Desa Cileungsi, PKK Desa Cileungsi, lalu perwakilan perempuan di Desa Cileungsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder merujuk pada kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya dan dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Ini mencakup informasi yang terkait dengan data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. seperti buku-buku, literatur dan bacaan, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan juga studi dokumen dan literatur.

a. Wawancara

Wawancara adalah menjawab atau memberikan sebuah pertanyaan kepada narasumber dari peneliti dalam ruang lingkup dua orang atau lebih (Danim, 2002). Fungsi dari wawancara adalah sebagai salah satu proses yang dilakukan peneliti dalam pencarian data ataupun melakukan pendalaman terhadap data-data yang peneliti dapatkan dari narasumber. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam riset ini ialah Perangkat Desa Cileungsi, PKK Desa Cileungsi, lalu perwakilan perempuan di Desa Cileungsi.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji fakta yang ada dari objek penelitian secara langsung. Adapun tujuan dari dilakukannya observasi antara lain adalah untuk mengumpulkan informasi dengan maksud untuk menggambarkan suatu peristiwa, orang, ataupun kegiatan tertentu berdasarkan sudut pandang individu. Adapun yang di observasi dalam penelitian ini ialah seperti kegiatan serta aktivitas PKK Desa Cileungsi dan juga kehidupan perempuan di Desa Cileungsi.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Pada metode pengumpulan data ini, informasi didapati dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan (Setiawan, 2018). Data dokumentasi dalam riset ini antara lain adalah dokumen-dokumen tentang RKPDes Desa Cileungsi, RPJMDes Desa Cileungsi, dan lain sebagainya. Selain dokumen-dokumen tersebut, peneliti juga mengumpulkan data dari studi literatur yang lain seperti buku, artikel jurnal, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman kegiatan menganalisis data harus memiliki tiga tahap antara lain : reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan (Silalahi, 2009). Reduksi data merupakan teknik menganalisis data yang memiliki tujuan untuk melakukan pemilihan dan pemilahan data serta penyederhanaan data yang ada di lapangan. Selama penelitian berlangsung peneliti akan melakukan proses reduksi data agar dapat menggolongkan data, menajamkan data serta membuang data yang peneliti anggap tidak perlu. Lalu penyajian data, menyusun data dengan bentuk tertentu seperti tabel, bagan, matrik dan sebagainya adalah suatu upaya dalam menyajikan data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan tentang data yang diperoleh. Setelah semua tahap telah dilalui, maka bagian akhir dalam penyajian data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan keseluruhan data yang didapat sehingga akan didapatkan kesimpulan akhir yang matang dan terstruktur.

H. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini berisikan mengenai rencana susunan penulisan dalam suatu penelitian. Dalam penyusunannya yakni dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan hingga bab akhir yaitu penutup. Sehingga dapat pula dikatakan, bagian ini merupakan *outline* dari penelitian yang akan diajukan.

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum, adapun gambaran yang dimaksud disini ialah latar belakang, lalu selanjutnya rumusan masalah, kemudian akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian, setelah itu ada manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, selain itu pada bagian ini juga dijelaskan mengenai tinjauan pustaka serta metode penelitian yang digunakan, kemudian selain itu dipaparkan juga mengenai sistematika penulisan sebagai rencana susunan penulisan dalam suatu penelitian sehingga membentuk satu kesatuan skripsi secara utuh.

BAB II: Kerangka Teori

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Ketahanan Sosial (*Social Resilience*) menurut Keck dan Sackdapolrak dan Advokasi Politik menurut Richey dan Taylor.

BAB III: Lanskap Desa Cileungsi dan PKK Desa Cileungsi

Bahasan pada bab ini ialah mengenai gambaran umum/landskap dari objek penelitian yaitu Desa Cileungsi. Peneliti memaparkan mengenai gambaran umum dari Desa Cileungsi, dimulai dari kondisi geografis, demografis, keadaan penduduk, dan lain sebagainya. Tak hanya gambaran umum dari Desa Cileungsi saja, akan tetapi dalam bab ini penulis pun akan memberikan gambaran PKK di Desa Cileungsi. Adanya gambaran umum tersebut akan membantu peneliti dalam memahami kondisi dan juga realitas dari Desa Cileungsi.

BAB IV: Aspirasi dan Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial bagi Perempuan dan Anak-Anak

Bahasan pada bab ini mengenai apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus perhatian PKK di Desa Cileungsi, serta bagaimana PKK mengadvokasi aspirasi tersebut untuk membangun ketahanan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi. Untuk menjawab semua itu, penulis menganalisis menggunakan teori ketahanan sosial menurut Keck dan Sakdapolrak dan juga advokasi politik menurut Richey dan Taylor.

BAB V: Dampak Advokasi PKK terhadap Kondisi Ketahanan Sosial Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak advokasi yang dilakukan oleh PKK terhadap kondisi ketahanan sosial perempuan dan anak-anak di Desa Cileungsi.

BAB VI: Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini ialah mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang juga menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain kesimpulan, pada bab inipun peneliti juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih bermanfaat bagi penelitian yang berkaitan dengan tema serupa.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konseptual

1. Advokasi

Menurut Edi Suharto (2007), istilah *advocaat* atau *advocateur* dalam bahasa Belanda memiliki arti sebagai pengacara atau pembela. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika advokasi sering diartikan sebagai pembelaan kasus atau berbicara di pengadilan. Namun, dalam bahasa Inggris ialah *advocate*, memiliki makna yang lebih luas dari hanya membela (*to defend*). Istilah tersebut juga mencakup promosi (*to promote*), penciptaan (*to create*), dan perubahan (*to change*).

Secara bahasa, advokasi berarti membela. istilah ini saat ini dikenal secara luas di masyarakat, tersebar melalui berbagai media massa dan dikenal di kalangan kaum pergerakan. Adapun beberapa contohnya ialah, advokasi kebijakan publik, advokasi buruh, dan advokasi hak-hak reproduksi. Dalam konteks perubahan sosial, advokasi dianggap sebagai salah satu bentuk perjuangan. Advokasi merupakan variasi upaya untuk mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang adil (Mukharrom, 2015).

Dikutip oleh M. Tamyiz Mukharrom (2015), menurut Mansoer Fakhri advokasi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Advokasi litigasi merujuk pada upaya advokasi yang melibatkan proses hukum hingga mencapai pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang resmi dan pasti. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk yang meliputi *class-action*, *judicial review*, dan *legal standing*. Sementara itu, advokasi nonlitigasi melibatkan metode yang tidak melibatkan proses hukum yang formal. Hal ini dapat mencakup pengorganisasian masyarakat, negosiasi, dan desakan

massa seperti demonstrasi dan aksi lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Advokasi bisa diartikan sebagai strategi atau cara yang digunakan untuk mendekati orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Advokasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir dengan tujuan mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan (Ramli, 2023).

Awalnya, istilah advokasi digunakan dalam konteks hukum atau pengadilan, dimana seseorang yang terlibat dalam kasus atau pelanggaran hukum diberikan upaya untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Namun, saat ini advokasi tidak terbatas pada bidang hukum saja. Advokasi melibatkan gabungan dari pendekatan dan kegiatan individu dan sosial untuk mendapat komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung terhadap suatu program. Untuk mencapai tujuan advokasi tersebut, berbagai kegiatan dan pendekatan dapat digunakan. Argumen yang kuat juga menjadi faktor penting dalam menjalankan advokasi secara efektif. Advokasi tidak hanya berarti membela, namun juga memajukan, mengemukakan, bahkan menciptakan perubahan (Ramli, 2023).

2. Peran Politik

Menurut Soerjono Soekanto (2009), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut.

Menurut Ahmadi (2007), peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Misalnya: dalam lapangan perusahaan, peranan sosial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Menurut Abdulsyani (2007), peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Peran diartikan sebagai kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu. Harapan dari peran adalah seseorang dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam posisi tertentu (Lantaeda, 2017). Peran apabila dilihat dari sudut pandang "*role theory*" adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi (Sarwono, 2015).

Maka peran politik dapat diartikan sebagai tindakan seseorang sesuai kewenangannya dalam hal kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut dapat diarahkan untuk kebaikan bersama.

3. Ketahanan Sosial

Ada banyak definisi yang dapat digunakan untuk menjelaskan ketahanan (*Resilience*), namun pada intinya adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap bertahan dalam menghadapi gangguan atau tekanan. Ketahanan suatu bangsa merujuk pada keadaan yang seluruh aspek kehidupan nasionalnya terintegrasi secara dinamis, yang mencakup kemampuan keuletan dan ketangguhan, serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang bisa membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup negara dan bangsa, serta usaha untuk mencapai tujuan nasional (Irmayani, 2021).

Ketahanan (*resilience*) telah berkembang dari yang awalnya berfokus pada keberlanjutan struktur dan fungsi ekosistem dalam lingkungan yang terus berubah, menjadi berfokus pada kemampuan sistem sosial-ekologi yang terintegrasi untuk beradaptasi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, ketahanan (*resilience*) juga mencakup kemampuan masyarakat untuk bertransformasi dalam menghadapi perubahan global (Irmayani, 2021).

Adapun pengertian ketahanan sosial merujuk pada kemampuan kelompok atau masyarakat untuk menahan gangguan yang berasal dari luar atau perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang dapat mengubah struktur sosial atau tatanan masyarakat (Adger, 2000). Masyarakat memiliki kapasitas untuk memperkirakan resiko, meminimalisir dampaknya, dan mengatasi perubahan dengan cepat melalui berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup, beradaptasi, berevolusi, dan juga tumbuh (Community & Regional Resilience, 2013).

Secara umum, ketahanan sosial (*social resilience*) merujuk pada keadaan suatu negara yang mencerminkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan juga tantangan (Silahudin & Lestari, 2022).

Dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa ketahanan sosial menggambarkan kondisi masyarakat yang secara konsisten berusaha dan mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan yang dapat mengancam identitas, integritas, dan kelangsungan hidupnya. ketahanan sosial mencakup kemampuan untuk mengatasi faktor eksternal dan mengurangi kerentanan dengan fokus utama pada meminimalkan kerugian dan memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat dengan cepat. Kemampuan ketahanan sosial juga dipengaruhi oleh keterikatan nilai-nilai sosial masyarakat terhadap nilai ekonomi, budaya, dan teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu.

4. PKK

PKK ialah gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari *Seminar Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Pada tahun 1961, Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang mengajarkan 10 Segi Kehidupan Keluarga di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS) ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. (PKK, 2010).

Pada bulan Mei tahun 1962, Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) didirikan di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, untuk menyebarkan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Di sekitar tahun 1967, sebagian besar masyarakat di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menderita Honger Odeem (HO) dan kehidupan mereka sangat menyedihkan. Tergerak oleh kondisi ini, Ibu Isriati Moenadi, sebagai istri Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan menginisiasi pendirian PKK di Jawa Tengah mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan. Pengurus PKK tersusun dari istri pimpinan daerah, tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki yang bekerja secara intensif untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK (PKK, 2010).

Setelah melihat keberhasilan PKK di Jawa Tengah, Presiden RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan program PKK di seluruh daerah di Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah meminta agar nama program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga diubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan menyalin surat tersebut kepada Gubernur seluruh Indonesia. Kemudian, pertemuan Rakernaslub PKK yang diadakan di Bandung pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2000 menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya menghasilkan keputusan terpenting yakni perubahan nama program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK, 2010).

PKK ialah salah satu organisasi masyarakat yang memberikan pemberdayaan kepada perempuan agar dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab 1 Pasal 1 Nomor 1 Ayat 5 Tahun 2013, dijabarkan bahwasanya yang dimaksud Gerakan Pemberdayaan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Kemendagri, 2013).

PKK ialah suatu wadah yang digunakan sebagai penggerak partisipasi masyarakat di lingkungan keluarga dengan tujuan untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Wadah ini membantu masyarakat untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan aspirasi dan inisiatif mereka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, PKK memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan

keluarga dan memberikan dukungan dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, PKK tidak hanya menjadi wadah untuk menggali partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk melaksanakan dan mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKK juga merupakan gerakan dan mekanisme yang telah berkembang di desa-desa di Indonesia dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan perempuan sebagai peran utama dalam gerakan ini. PKK merupakan inisiatif pembangunan masyarakat yang muncul dari lapisan masyarakat yang lebih rendah, yang fokusnya pada perempuan sebagai penggerak utama untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mengumpulkan, mengerahkan, serta membangun keluarga sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Keberhasilan PKK dalam memajukan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah hasil dari upaya kolaboratif antara perempuan sebagai penggerak utama dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam gerakan ini. PKK memiliki 10 program pokok, diantaranya: Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat (PKK, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan perempuan sebagai peran utama dalam proses tersebut. PKK memiliki tujuan untuk menumbuhkan, mengumpulkan, mengerahkan, dan membangun keluarga sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

B. Teori Penelitian

1. Ketahanan Sosial

Konsep ketahanan sosial telah menjadi topik yang sering dibahas dalam berbagai konteks, termasuk dalam mitigasi bencana, ekologi, kesehatan, psikologi, dan kajian pembangunan sosial-ekonomi lainnya. Secara sederhana, konsep ketahanan sosial dapat dijelaskan sebagai kemampuan dalam menghadapi resiko yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik disekitarnya (Latifa, 2019). Secara umum, ketahanan sosial (*social resilience*) merujuk pada keadaan suatu negara yang mencerminkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan juga tantangan (Silahudin & Lestari, 2022).

Pada prinsipnya, berbagai konsep ketahanan telah diusulkan oleh para ahli, termasuk salah satunya *The Resilience Alliance* yang mendefinisikan ketahanan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari manusia dan alam yang terintegrasi yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengatasi gangguan yang muncul dalam sistem. Selain itu, ketahanan juga terlihat saat sistem dapat mengatur dan mengorganisir dirinya sendiri, serta ketika sistem dapat membangun dan meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dan beradaptasi (Carpenter, 2001). Studi psikologi tentang perkembangan anak dan ekologi sosial juga memiliki konsep mereka tersendiri tentang ketahanan. Walaupun ada berbagai macam konsep ketahanan, semuanya mencakup pemahaman tentang proses adaptasi sebagai respons terhadap kesulitan untuk mencapai hasil yang positif atau tujuan yang diinginkan (Folke, 2002). Pembahasan mengenai ketahanan tidak hanya berkaitan dengan faktor individual ataupun pribadi, namun juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang bersifat protektif seperti dukungan dari orang tua, teman sebaya, atau organisasi masyarakat yang mendukung perilaku dan nilai-nilai yang responsif secara kompeten. Kemampuan untuk beradaptasi dalam konsep ketahanan seringkali dikaitkan dengan pembelajaran, bukan hanya pada tingkat individual, tetapi juga pada

tingkatan organisasi atau jaringan sosial yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, sehingga mampu membantu menyelesaikan masalah secara fleksibel dan menyeimbangkan kekuatan antara kelompok (Latifa, 2019).

Pfeifer, dkk (2013), menjelaskan bahwa ada empat aspek untuk mempelajari ketahanan sosial yang perlu diperhatikan, yaitu ancaman, kapasitas, faktor pendorong, dan hasil. Jenis ancaman dapat bervariasi, baik terkait dengan lingkungan, bersifat individual atau kelompok, jangka panjang, atau terkait dengan peristiwa serius seperti penyakit yang parah ataupun kematian. Kapasitas tergantung pada tiga model, yaitu model ekonomi, budaya, dan sosial. Pendidikan, keterampilan, dan sikap termasuk ke dalam modal budaya. Individu, kelompok, dan organisasi (termasuk pemerintah) memiliki kapasitas yang perlu dipahami dengan baik. Faktor-faktor pendorong atau intervensi juga memiliki peranan yang signifikan dalam membangun ketahanan individu melalui pengembangan berbagai modal, termasuk aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Peran pemerintah sangat krusial dalam konteks ini, karena mereka bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan regulasi, menyediakan fasilitas, serta mendukung penyampaian informasi dan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dan LSM untuk membangun ketahanan. Serta apakah mereka mendukung individu, kelompok, organisasi atau kelompok penduduk tertentu. Dalam hal hasil, mungkin ada satu atau lebih hasil yang diinginkan yang perlu dipertimbangkan.

Pfeifer, dkk (2013), membagi aspek ketahanan sosial menjadi empat bagian, diantaranya:

- 1) *Threats* (Ancaman), mencakup berbagai jenis ancaman atau masalah yang dihadapi.
- 2) *Capacity* (Kapasitas), kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman dengan cara reaktif ataupun proaktif.
- 3) *Enabling Factor* (Faktor Pendukung), meliputi program intervensi yang dapat memperkuat ketahanan individu/kelompok melalui modal ekonomi, manusia, dan sosial.
- 4) *Outcome* (Hasil Upaya), yang menjadi tujuan dari upaya memperkuat ketahanan sosial.

Pada artikel yang berjudul “*An Introduction to the Social Resilience Model*”, Laurie Leitch (2020) memaparkan bahwa ketahanan sosial (*social resilience*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang maupun kelompok (keluarga, komunitas, negara, dan perusahaan) untuk meningkatkan produktivitasnya selama masa stabil dan beradaptasi, mereorganisasi, dan berkembang sebagai respons terhadap gangguan. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi secara tepat waktu.

Menurut Betke (2002), ketahanan sosial adalah sebuah proses dimana sebuah komunitas mampu mengatur dirinya sendiri untuk bertahan dan mengatasi kesulitan, serta memberikan arti penting dalam mempertahankan kehidupan yang berkontribusi bagi sekitar. Ketahanan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengatasi masalah, beradaptasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dalam kehidupan mereka. Ketahanan sosial ialah bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari ketahanan nasional.

Menurut Bahransyaf & Proboresi (2013), Konsep ketahanan sosial dibutuhkan masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperluas jaringan perlindungan sosial, keterlibatan masyarakat, pengendalian konflik, serta kebijaksanaan lokal dalam mengelola SDA serta SDM. Masyarakat akan mencapai ketahanan sosial jika terpenuhi kebutuhan akan pelayanan sosial yang fleksibel, sensitif, dan menyeluruh, serta terbentuk dalam pengembangan sosial untuk setiap individu, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri secara otomatis dengan perubahan sosial yang terjadi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan hak asasi universal yang progresif.

Keck & Sakdapolrak (2013) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kemampuan kelompok sosial, baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas untuk menanggulangi, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai ancaman lingkungan dan sosial.

Adapun aspek ketahanan sosial yang dibagi oleh Keck dan Sakdapolrak (2013), sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mengatasi masalah (*coping capacities*), merujuk pada kemampuan seseorang dalam menangani dan mengatasi situasi yang sulit dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari kemampuan ini adalah untuk memulihkan kondisi seseorang setelah mengalami kejadian yang berpotensi merugikan.
- 2) Kemampuan adaptasi (*adaptive capacities*), mengacu pada kecakapan seseorang dalam mempelajari pengalaman di masa lalu, serta berantisipasi resiko di masa depan untuk mengamankan situasi saat ini. Kemampuan adaptasi ini ditujukan untuk menghadapi perubahan sosial yang terus meningkat.

- 3) Kemampuan transformasi dan berpartisipasi (*transformative capacities*), mencakup kemampuan seseorang dalam mengakses bantuan dan sumber daya dari berbagai organisasi pemerintah dan masyarakat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan sosial yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan sosial adalah suatu kemampuan individu ataupun kelompok (baik keluarga, organisasi, maupun komunitas) untuk mengatasi dan juga menyesuaikan diri dari berbagai ancaman baik itu ancaman yang ada di lingkungan, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Jika suatu komunitas ataupun individu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, serta mampu bertransformasi guna mengikuti perkembangan perubahan sosial, maka hal ini menunjukkan bahwa individu ataupun komunitas tersebut memiliki ketahanan sosial yang baik.

Pemahaman ketahanan sosial yang dijabarkan oleh Keck dan Sakdapolrak, yang menjelaskan bahwasanya ketahanan sosial terdiri dari tiga aspek diantaranya, *coping capacities*, *adaptive capacities*, dan juga *transformative capacities* dijadikan oleh penulis sebagai kerangka analisis pada penelitian ini. Penulis ingin menggunakan konsep ketahanan sosial yang dijelaskan oleh Keck dan Sakdapolrak untuk melihat apa aspirasi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus bagi PKK di Desa Cileungsi.

2. Advokasi Politik

Advokasi politik diartikan Richey dan Taylor (2021) sebagai jenis komunikasi politik tertentu dimana individu berusaha untuk merekomendasikan kandidat atau kebijakan pilihan mereka dalam diskusi dengan orang lain. Para pendukung mencoba mempengaruhi suara orang lain dengan mencoba mendapatkan suara orang yang tidak mempunyai mobilitas untuk memilih atau mencoba membuat seseorang mengubah preferensi atau intensitas dukungannya. Apapun itu, tujuan dari advokasi adalah untuk membuat seseorang berubah, dan hal ini biasanya memerlukan artikulasi ide-ide seseorang dan menunjukkan potensi konflik. Richey dan Taylor beranggapan bahwa advokasi perlu diselidiki lebih lanjut karena melakukan advokasi terhadap seorang kandidat mengharuskan warga negara untuk menguraikan keyakinan mereka mengenai kandidat atau isu-isu tertentu dan merupakan dialog yang sangat penting dalam dunia nyata. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang yang belum berkomitmen. Para advokat akan mencoba meyakinkan orang lain untuk menjadi aktif, atau jika sudah aktif untuk meningkatkan tingkat dukungan mereka, atau bahkan berpindah pihak ketika mereka merasa bahwa ada peluang sah bagi kandidat pilihan mereka untuk menang.

Advokasi juga memiliki unsur keterlibatan yang lebih dalam daripada diskusi sederhana. Diskusi politik bisa saja bersifat dangkal atau sangat intens, namun diskusi tidak selalu dimaksudkan untuk mengadvokasi posisi, partai, atau kandidat yang diinginkan. Oleh karena itu, advokasi merupakan sebuah langkah melampaui diskusi menuju ranah komunikasi politik dimana konflik bisa saja terjadi. Advokasi politik dapat diartikan sebagai diskusi politik antarpribadi yang jauh lebih dalam dan berpotensi akan konflik. Hal ini juga dimaknai sebagai advokasi politik interpersonal dimana pelaku advokasi, sebagai diri pelaku advokasi sendiri, berusaha untuk terlibat dengan orang lain untuk mengubah pikiran mereka atau secara umum mempengaruhi mereka agar

menganggap posisi pengadvokasi sebagai miliknya (Richey dan Taylor, 2021).

Richey dan Taylor (2021) juga menambahkan beberapa potensi hambatan yang akan dihadapi oleh seorang advokat. Pertama, seorang advokat harus yakin akan keahlian, pengetahuan, dan pengalamannya. Advokat harus memiliki kepercayaan diri untuk berada pada posisi terbaik dalam hal memberikan informasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain berdasarkan pemahaman advokat terhadap isu politik yang sedang dihadapi. Kedua, seorang advokat memiliki kenyamanan dan kemampuan dalam menangani konflik, karena advokasi adalah salah satu jenis diskusi yang tampaknya mendorong terjadinya konflik.

Pembahasan mengenai advokasi politik oleh Richey dan Taylor (2021) membawa kita menyelam lebih dalam pada pisau analisis yang disajikan dalam tiga lingkup. Mereka berteori bahwa terdapat pengaruh pada tingkat makro dari lingkungan kampanye, tingkat menengah yang terdiri dari komposisi jaringan sosial, dan tingkat mikro dari karakteristik individu, seperti kepentingan politik, keberpihakan negatif, dan ciri-ciri kepribadian. Mereka berpendapat bahwa ketiga hal tersebut saling berinteraksi, sehingga misalnya, seseorang yang memiliki kepentingan politik akan lebih cenderung melakukan advokasi dalam pemilu yang kompetitif dibandingkan pemilu yang nonkompetitif. Mengingat bahwa advokasi adalah perilaku yang berdampak pada tiga tingkatan, Richey dan Taylor menegaskan bahwa kondisi yang memprediksi advokasi adalah: (1) meningkatnya persaingan politik di tingkat makro, (2) karakteristik yang relevan dengan jaringan sosial seperti *social distance* dan homogenitas ideologi jaringan, dan (3) kepentingan dan keterlibatan politik, keberpihakan negatif, dan kecenderungan berbasis kepribadian untuk terlibat secara terbuka di tingkat individu.

Penjelasan mengenai ketiga tingkat pengaruh dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat Makro

Tingkatan ini menjelaskan kepada kita bahwa meningkatnya persaingan politik dalam ranah makro dapat mempengaruhi perilaku tingkat mikro. Advokasi adalah salah satu jenis komunikasi politik yang bersifat konflik, dan masyarakat tidak mungkin terlibat dalam advokasi jika mereka tidak yakin bahwa terdapat alasan yang kuat di balik kepentingannya. Richey dan Taylor memberikan gambaran pada pemilu yang kompetitif, dimana dampak dari perilaku tersebut lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Jika pemilu tidak kompetitif, tidak ada alasan untuk menanggung biaya sosial tersebut. Oleh karena itu, advokasi lebih mungkin dilakukan ketika lingkungan makro politik sedang kompetitif.

b. Tingkat Menengah

Richey dan Taylor (2021) menjelaskan faktor pendorong lain dari advokasi politik adalah jaringan sosial dan tingkatan individu. Advokasi dapat terjadi ketika pihak yang berdiskusi mengambil sudut pandang yang berlawanan, atau dapat terjadi ketika mitra diskusi tidak berkomitmen atau tidak mendukung sudut pandang yang diinginkan. Situasi pertama kemungkinan besar akan menyebabkan tingkat konflik dan ketidaksepakatan yang lebih tinggi, namun situasi kedua tidak selalu penuh dengan konflik, namun tentu saja akan menjadi aktivitas berbiaya tinggi di pihak advokat. Mengingat sifat advokasi sebagai suatu kegiatan yang tampak ambivalen, ada dua pertanyaan empiris utama yang harus dijawab: seberapa besar konflik yang terjadi ketika orang melakukan advokasi dan kita perlu menguraikan sejauh mana komposisi jaringan dan kekuatan ikatan pribadi terhadap hal yang diadvokasi.

Ketika mempertimbangkan ikatan pribadi, orang-orang yang dapat diajak advokasi mungkin bukan orang-orang terdekat (misalnya keluarga) atau orang yang paling jauh (misalnya orang asing), melainkan orang-orang yang berada di antara keduanya. Noelle-Neumann (1984) dalam Richey dan Taylor (2021) berpendapat bahwa orang-orang mungkin terjebak dalam “*spiral of silence*” dan tidak mengutarakan pendapat mereka untuk menghindari konflik. Noelle-Neumann mengklaim bahwa individu akan enggan menentang suatu ide atau posisi yang bertentangan dengan idenya jika mereka merasa ide atau posisi tersebut mendapat perhatian publik. Sementara itu Mutz (2006) dalam Richey dan Taylor (2021) juga menyatakan bahwa hubungan yang sangat dekat juga mempunyai “*spiral of silence*” karena hubungan ini terlalu berharga untuk dirusak oleh perselisihan politik. Kombinasi ketiga rangkaian penelitian ini menunjukkan jenis jaringan yang mendorong advokasi. Berdasarkan logika gabungan dari literatur sebelumnya, Richey dan Taylor berhipotesis bahwa hubungan yang sangat dekat dan jauh seharusnya kurang mendapat advokasi, namun hubungan yang agak dekat akan memiliki kelebihan yang cukup untuk memungkinkan adanya advokasi.

Chan dan Misra (1990) dalam Richey dan Taylor (2021) berpendapat bahwa advokasi politik merupakan perpanjangan langsung dari ilmu pemimpin opini, karena para pemimpin opini mungkin mencoba mempengaruhi suara dari jaringan sosial mereka. Selanjutnya, Venkatraman (1989) dalam Richey dan Taylor (2021) melihat pemimpin opini sebagai komunikator tatap muka yang efektif, dan umumnya berasal dari jaringan sosial tempat mereka memberikan advokasi.

Venkatraman juga menemukan bahwa agar pemimpin opini menjadi efektif diperlukan tiga kondisi: pengaruh interpersonal, keterhubungan, dan homofili (jaringan sosial yang homogen). Benang merah dari tingkat menengah ini adalah advokasi, sebagai jenis komunikasi berbasis konflik, paling baik dilakukan pada jarak yang memungkinkan diskusi menjadi relevan, namun tidak akan membahayakan hubungan secara substantif. Oleh karena itu, memahami perbedaan dalam cara komposisi jaringan sosial dan cara komunikasi mempengaruhi kemungkinan advokasi.

c. Tingkat Mikro

Richey dan Taylor (2021) tidak hanya berhenti pada hipotesis tentang tingkatan makro dan jaringan, mereka juga mempertimbangkan aspek psikologi dan kepribadian pada setiap individu pada suatu pertemuan. Orang dengan kepribadian ekstrovert memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan advokasi.

Selain itu, orang-orang yang emosinya lebih stabil lebih besar kemungkinannya untuk dilibatkan dalam advokasi politik karena diperlukannya tingkat pengetahuan dan efektivitas yang tinggi. Selanjutnya, aspek lain dari politik afektif yang diyakini akan mempunyai dampak prediktif terhadap advokasi politik adalah keberpihakan negatif atau polarisasi afektif. Mengutip (Abramowitz dan Webster 2016; Iyengar dan Westwood 2015) dalam Richey dan Taylor (2021) keberpihakan negatif adalah fenomena yang relatif baru dimana pilihan suara masyarakat Amerika tidak lagi didorong oleh ketertarikan mereka terhadap partai atau kelompok ideologi pilihan mereka, melainkan antipati yang mereka rasakan terhadap pihak lain. Variabel ini muncul dari keengganan yang lebih kuat untuk melihat kemenangan lawan dari kandidat yang diusungnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan yang negatif seharusnya mempengaruhi advokasi politik karena mereka yang memilih secara

langsung kemungkinan besar akan melibatkan orang lain dalam pilihan suaranya.

Pada intinya, advokasi adalah sebuah bentuk diskusi politik antarpribadi yang bersifat konfliktual dan lebih mungkin terjadi karena lingkungan politik yang semakin kuat. Hal ini juga akan lebih mungkin terjadi ketika calon peserta diskusi berada pada jarak sosial yang sesuai. Terakhir, pada tingkat individu, di luar variabel yang diharapkan seperti kepentingan politik, pengetahuan politik, dan kemandirian politik, tipe kepribadian tertentu dan polarisasi afektif akan berkorelasi dengan peningkatan advokasi politik.

BAB III

LANDSKAP DESA CILEUNGSI DAN PKK

A. Lanskap Desa Cileungsi

1. Sejarah Desa Cileungsi

Desa Cileungsi ialah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada masa penjajahan, Desa Cileungsi belum terbentuk menjadi sebuah pemerintahan seperti sekarang, cikal bakal terbentuknya Desa Cileungsi dimulai dari kepemimpinan yang disebut mandor. Seiring berjalannya waktu kemudian masyarakat setempat mengadakan musyawarah adat sehingga terbentuklah sebuah pemerintahan tingkat desa bernama Desa Cileungsi.

Pemerintah Desa Cileungsi dibentuk pada tahun 1954, kemudian diadakan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih seorang warga yang bernama R. Musyai. Dengan berbagai kendala yang dihadapi saat itu, dimana kantor desapun belum ada. Disisi lain kondisi politik yang belum stabil, R. Musyai dengan kesabarannya tetap bertekad untuk menjadikan Desa Cileungsi yang maju dan sejahtera, sehingga beliau menduduki jabatan Kepala Desa Cileungsi selama 24 tahun yang dimulai dari tahun 1954 sampai dengan 1978. Berdasarkan musyawarah adat setempat yang didukung oleh pemerintah Kecamatan Cileungsi serta pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Kwadaan pada tahun 1954 terbentuklah sebuah desa yang diberi nama Desa Cileungsi hingga sampai sekarang.

Kata Cileungsi Berasal dari kata “Culang Cileung Sisi Cai” yang berasal dari bahasa daerah Jawa Barat, yaitu Bahasa Sunda. Kata “Culang Cileung Sisi Cai” memiliki arti “Mengintip Kanan Kiri Sungai”. Asal-usulnya berasal dari kebiasaan masyarakat Cileungsi pada masa penjajahan, yaitu mengambil air di sungai Cileungsi. Karena air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan ini, masyarakat selalu mengunjungi sungai setiap harinya, sehingga dapat disangkutpautkan dengan kata “Culang Cileung Sisi Cai”.

Namun jika melihat faktanya, Asal mula Cileungsi sebenarnya sudah disebutkan sejak masa awal kolonialisme. Bukan itu saja, naskah Bujangga Manik menyebutkan pengembaraan seorang resi Kerajaan Sunda dari Jawa ke Bali pada tahun 1500an awal. Dalam catatannya, Bujangga Manik menyebut bahwa dirinya telah melewati Sungai Ci Leungsi. Dengan demikian penyebutan nama Ci Leungsi sudah sejak masa Kerajaan Sunda masih berdiri atau sebelum tahun 1500-an.

Asal mula Cileungsi menurut budayawan T. Bachtiar berasal dari kata leungsing, yaitu sejenis lintah yang dulu banyak ditemukan di sungai tersebut. Terlebih lagi penamaan daerah di tanah Sunda umumnya didasarkan pada karakteristik daerah, kondisi geografis, tumbuhan, dan satwanya.

Terlepas dari mana asal usul cileungsi yang tepat, di masa penjajahan daerah yang dikenal dengan nama Tjileungsi atau Tjileungsir ini dulunya adalah kawasan perkebunan karet yang sangat luas. Perkebunan karet ini dikelola oleh Belanda untuk memperkuat perbekalan perang. Di daerah ini juga didirikan resimen Belanda yang bertugas mengawasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berasal dari Cileungsi.

2. Kondisi Geografis Desa Cileungsi

Gambar 3.1 Peta Desa Cileungsi



(Sumber : Kantor Desa Cileungsi 2023)

Desa Cileungsi merupakan desa yang berada di Kecamatan Cileungsi yang letaknya berada di sebelah timur Kabupaten Bogor. Secara geografis, Desa Cileungsi terletak di Barat Kota Kecamatan Cileungsi yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bogor dengan jarak 1 Km dari Ibu Kota Kecamatan Cileungsi, 25 Km dengan Ibu Kota Kabupaten Bogor, 190 Km dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, lalu 55 Km dengan Ibu Kota Indonesia (Jakarta). Saat ini Desa Cileungsi memiliki 6 Dusun antara lain; Kp. Kaum, Kp. Pasar, Kp. Tengah, Kp. Rawahingik, Kp. Cikalagan, Kp. Rawa Belut. Selain itu Desa Cileungsi terdiri dari 21 Rukun Warga (RW), dan 65 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 3. 1 Wilayah Desa Cileungsi

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kp. Kaum	2	7
2	Kp. Pasar	2	5
3	Kp. Tengah	3	9
4	Kp. Rawahingkik	6	20
5	Kp. Cikalagan	3	8
6	Kp. Rawa Belut	3	11

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Luas wilayah Desa Cileungsi sendiri sekitar 435,25 Ha, di atas permukaan laut 180 M. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali. Adapun batas-batas wilayah desa Cileungsi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Limusnunggal
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Cileungsi Kidul
- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Puteri
- d) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Cileungsi Kidul

3. Kondisi Demografi Desa Cileungsi

Adapun jumlah penduduk Desa Cileungsi tercatat sebanyak 23.329 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.254 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Cileungsi 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11719
2	Perempuan	11610
JUMLAH		23.329

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.719 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.610 jiwa.

Tabel 3. 3 Usia Penduduk Desa Cileungsi 2022

No	Usia	Jumlah
1	0 - 14 Tahun	6.779
2	15 - 29 Tahun	6.897
3	30 - 44 Tahun	4.114
4	45 - 59 Tahun	3.656
5	60 - 69 Tahun	1.659
6	>70 Tahun	224
JUMLAH		23.329

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari data tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Cileungsi jika dilihat dari segi umur paling banyak ialah jumlah penduduk dengan usia 15 – 29 tahun dengan jumlah 6.897 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah jika dilihat dari usia ialah di usia 70 tahun ke atas dengan jumlah 224 jiwa.

Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cileungsi 2022

No	Tingkat Pendidikan penduduk	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	4.628
2	Tamat SD	662
3	Tamat SLTP	5.813
4	Tamat SLTA	6.924
5	D1	647
6	D2	629
7	D3	451
8	S1	2.721
9	S2	123
10	S3	27
JUMLAH		23.329

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Jika dilihat dari data tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Cileungsi dilihat dari tingkat pendidikan terbanyak ialah lulusan SLTA/ sederajat dengan jumlah 6.924 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan terendah sebanyak 27 yaitu lulusan S3.

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Tabel 3. 5 Jenis Kesejahteraan Keluarga Desa Cileungsi

No	Jenis Keluarga Sejahtera	Jumlah (per KK)
1	Keluarga Prasejahtera	603
2	Keluarga Sejahtera I	2.307
3	Keluarga Sejahtera II	4.110
4	Keluarga Sejahtera III	878
5	Keluarga Sejahtera III+	356
JUMLAH		8.254

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari data tabel di atas, diketahui bahwasanya kategori kesejahteraan keluarga tertinggi di Desa Cileungsi ialah kategori keluarga sejahtera II dengan jumlah 4.110 KK. Adapun diketahui bahwa kategori keluarga sejahtera II adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator Keluarga Sejahtera I dan delapan indikator Keluarga Sejahtera II. Adapun delapan indikator Keluarga Sejahtera II antara lain:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Paling kurang sekali dalam seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, atau telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga bisa melaksanakan tugas masing-masing.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

7. Seluruh anggota umur 10 - 60 tahun bisa baca tulis latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

Tabel 3. 6 Jumlah Murid dan Guru Desa Cileungsi

No	Jenis Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa
1	TK	31	164
2	SD	274	4.320
3	SLTP/Sederajat	98	971
4	SLTA/Sederajat	120	964
5	Perguruan Tinggi	46	969
JUMLAH		569	7.388

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwasanya jumlah siswa dan juga jumlah pengajar terbanyak di Desa Cileungsi ialah terdapat pada tingkatan Sekolah Dasar dengan jumlah murid sebanyak 4.320 siswa dan untuk jumlah pengajarnya yakni 274 guru.

Tabel 3. 7 Jumlah Gedung Pendidikan Desa Cileungsi

No	Jenis Gedung	Sewa	Milik Sendiri	Jumlah
1	Gedung TK	0	10	10
2	Gedung SD	0	15	15
3	Gedung SLTP/Sederajat	0	7	7
4	Gedung SLTA/Sederajat	0	9	9
5	Gedung Perguruan Tinggi	1	2	3
6	Lembaga Pendidikan Agama	0	9	9
JUMLAH		1	52	53

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Cileungsi terdapat sarana pendidikan sebanyak 53 unit dengan rincian 10 gedung TK, 15 gedung SD, 7 gedung SMP, 9 gedung SMA, 3 gedung Perguruan Tinggi, serta 9 gedung Lembaga Pendidikan Agama.

Tabel 3. 8 Sarana Kesehatan Desa Cileungsi

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1
2	Puskesmas	1
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	7
4	Apotek	6
5	Posyandu	21
6	Toko Obat	9
7	Rumah/Kantor Praktek Dokter	7
8	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	5
JUMLAH		57

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dalam tabel di atas merinci banyaknya ranah kesehatan di Desa Cileungsi yang memiliki sarana kesehatan sebanyak 57 unit, yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, poliklinik, apotek, posyandu, toko obat, rumah/kantor praktek dokter, serta balai kesehatan ibu dan anak.

Tabel 3. 9 Sarana Peribadatan Desa Cileungsi

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	14
2	Mushola	21
3	Gereja Kritean Protestan	5
4	Gereja Kristen Katholik	2
5	Klenteng	2
JUMLAH		44

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya sarana peribadatan terbanyak di Desa Cileungsi ialah mushola dengan jumlah 21 unit lalu terbanyak kedua yakni masjid sebanyak 14 unit. Hal ini lantaran mayoritas penduduk Desa Cileungsi adalah Islam.

Tabel 3. 10 Sarana Olahraga Desa Cileungsi

No	Jenis Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Futsal	4
2	Lapangan Bulu Tangkis	14
3	Lapangan Sepak Bola	1
4	Lapangan Basket	5
5	Lapangan Voli	5
JUMLAH		29

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Desa Cileungsi sendiri untuk sarana olahraganya bisa dikatakan cukup lengkap. Adapun sarana olahraga terbanyak di Desa Cileungsi ialah lapangan bulu tangkis sebanyak 14 unit.

Tabel 3. 11 Mata Pencaharian Penduduk Desa Cileungsi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	66
2	Pedagang Kelontong	680
3	Perawat Swasta	124
4	Bidan Swasta	12
5	TNI	31
6	Polri	34
7	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	3.811
8	Dosen Swasta	6
9	Pedagang Keliling	114
10	Karyawan Swasta	4.413
11	Wiraswasta	3.797
12	Konsultan Manajemen dan Teknis	6
13	Belum Bekerja	770
14	Pelajar	3.094
15	Ibu Rumah Tangga	1.021
16	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	785
17	Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	1.710
18	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3.427

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Dari tabel di atas diketahui bahwa di Desa Cileungsi sendiri untuk mata pencaharian penduduk terbanyaknya diduduki oleh pekerjaan karyawan swasta dengan jumlah 4.413 jiwa. Hal tersebut terjadi lantaran, di Desa Cileungsi sendiri berada diantara perusahaan dan juga untuk lokasi Desa Cileungsi sendiri berada dekat dengan ibu kota negara yakni Jakarta. Adapun diketahui untuk jenis tipologi desanya ialah perindustrian/jasa.

5. Kondisi Politik dan Pemerintahan

Pemerintahan Desa Cileungsi, yang sekarang memerintah adalah berasal dari hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 2019, kemudian kepala desa terpilih dilantik dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/245/Kpts/Per-UU/2013, tanggal 12 April 2013 tentang pengesahan Pengangkatan Saudara **H. BENI SOPIAN**, sebagai Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi, Masa Bakati 2019-2025.

Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga perangkat desa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Adapun lembaga-lembaga desa di Desa Cileungsi sendiri terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cileungsi

No	Nama	Jabatan
1	H. Beni Sopian	Kepala Desa
2	Supendi	Sekretaris
3	Jepi Irianto	Kasi Pemerintahan
4	Idi Tarmidi	Kasi Kesejahteraan
5	Oceu Megayadi	Kasi Pelayanan
6	Nurdin	Kaur Keuangan
7	Lulu N Aksan	Kaur TU dan Umum
8	Wahidin Permana	Kaur Perencanaan
9	H. Marzuki	Kepala Dusun
10	Sugianto	Kepala Dusun

11	Supriyatna	Kepala Dusun
12	Tismawan	Kepala Dusun
13	H. S Tungga	Kepala Dusun
14	Asep Hermawan	Kepala Dusun

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Tabel 3. 13 Struktur Anggota BPD Desa Cileungsi

NO	BPD	JABATAN
1	Asep Kostiana	Ketua
2	H. Hasan Komarudin	Wakil Ketua
3	Hj. Luli Nurlaeli	Anggota
4	Suparman	Anggota
5	Danu Kurniawan	Anggota
6	Agus Suhandi	Anggota
7	Dadang Suhandi	Anggota
8	Edwar Sundawa	Anggota
9	Dheny Abduh Riesda	Anggota

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwasanya dalam struktur organisasi pemerintahan Desa Cileungsi di dominasi oleh laki-laki, baik dalam perangkat desa maupun BPD. Pada lembaga pemerintahan Desa Cileungsi hanya terdapat satu anggota perempuan saja yakni Hj. Luli Nurlaeli selaku anggota BPD. Hal ini terjadi lantaran minat perempuan di bidang politik itu masih kurang. Selain itu juga untuk menjadi perangkat desa itu harus siap fisik maupun waktu dalam berkegiatan di masyarakat, diketahui pula selain berkegiatan di siang hari perangkat desa juga banyak melakukan kegiatan di malam hari lantaran banyaknya perangkat lingkungan desa seperti RT maupun RW yang berkegiatan di siang hari sehingga untuk melakukan koordinasi antara perangkat desa dengan

perangkat lingkungan sekitar itu biasanya dilakukan di malam hari, seperti halnya melakukan rapat maupun musyawarah. Selain itu juga diketahui bahwa untuk menjadi perangkat desa itu haruslah tegas sedangkan perempuan itu sifatnya keibuan atau dapat dikatakan juga mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Dan hal tersebutpun dikonfirmasi oleh Sekertaris Desa Cileungsi:

“Perempuan itu masih kurangnya edukasi untuk kegiatan yang sifatnya kepolitikan. Karena perempuan itu masih ketika kita bicara sosial sudah bagus, keagamaan sudah bagus, kendalanya ya di sifat politik yaa. Dalam artian disini, perempuan itu kan masih ketergantungan dengan suami biasanya, jadi masih belum ada tipikal perempuan yang bisa menjadi seorang tokoh atau pemimpin masih jarang, seperti misal gak jauh dari pimpinan ketua RT, ketua RW masih sangat minim yang mau tampil untuk memimpin di masyarakat. Alasannya lantaran karena minat perempuan untuk di bidang politik di desa sendiri itu kurang, perlu saya sampaikan secara tidak langsung perangkat desa itu bekerja 24 jam artinya masih ada kendala di kami di masalah perempuan, satu perempuan itu kan kita juga harus sadari ada kelemahan baik fisik ataupun waktu untuk berkegiatan di masyarakat, kedua perempuan itu kan masih sifatnya keibuan, jadi kami perangkat desa itu harus tegas, harus menyiapkan waktu dan pembagian itu kendala kami. Perempuan itu, untuk berpolitik mengambil keputusan masih sangat kecil karena mereka masih mengandalkan kami-kami yang lelaki seperti apa keputusan yang akan dibuat itu salah satu kendala kami. Kami pun juga bukan kami tidak mengakomodir perempuan di perangkat desa itu tidak, karena kami menyadari juga di desa itu bukan hanya berkegiatan di siang hari, tetapi juga kami berkegiatan di malam hari karena kita menyadari banyak perangkat lingkungan kita yang berkegiatan di pagi dan siang hari, dan kami selalu berkordinasi baik rapat ataupun musyawarah seringnya malam hari dan itu menjadi kendala kami ketika nanti misalkan perempuan

diakomodir untuk menjadi perangkat desa” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menyoroti kurangnya edukasi politik bagi perempuan, dengan fokus pada kendala-kendala seperti ketergantungan pada suami dan minimnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik desa. Pembicara menekankan bahwa perangkat desa secara tidak langsung bekerja 24 jam dan menyadari kelemahan fisik dan waktu perempuan, dalam mengakomodir perempuan saat kegiatan malam hari dan pengambilan keputusan politik. Meskipun diinginkan, partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan desa masih terbatas, sebagian karena kurangnya minat dan kendala struktural dalam lingkup pekerjaan perangkat desa.

Berikut adalah nama-nama kepemimpinan Desa Cileungsi dari awal sampai sekarang:

Tabel 3. 14 Nama-Nama Kepemimpinan Desa Cileungsi

No	N a m a	Tahun	Keterangan
1	R. Musyai	1954 – 1978	
2	R. Komar	1978 – 1986	
3	H. Abdul Manan	1986 – 1998	
4	Syamsudin	1998 – 1998	PLT
5	Suherman	1998 – 2007	
6	Muhammad Fatullah	2007 – 2007	PLT
7	H. Beni Sopian	2007 – 2019	
8	TB Yudhi Hartawan	2019 – 2019	Pejabat
9	H. Beni Sopian	2019 – 2025	

(Sumber : Kantor Desa Cileungsi, 2023)

Pemerintah Desa Cileungsi dibentuk pada tahun 1954, kemudian diadakan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih seorang warga yang bernama R. Musyai. Dengan berbagai kendala yang dihadapi saat itu, dimana kantor desapun belum ada. Disisi lain kondisi politik yang belum stabil, R. Musyai dengan kesabarannya tetap bertekad untuk menjadikan Desa Cileungsi yang maju dan sejahtera, sehingga beliau menduduki jabatan Kepala Desa Cileungsi selama 24 tahun yang dimulai dari tahun 1954 sampai dengan 1978.

Dari data tabel kepemimpinan Desa Cileungsi di atas, dapat diketahui bahwasanya dari awal terbentuk hingga saat ini Desa Cileungsi belum pernah dipimpin oleh pemimpin perempuan. Diketahui juga Bapak H. Beni Sopian telah menjabat sebagai Kepala Desa Cileungsi selama 3 periode. Awal mula masa menjabatnya di mulai saat Pilkada tahun 2007 dan karena dedikasi dan kinerjanya yang baik untuk Desa Cileungsi, akhirnya beliau terpilih lagi menjadi Kepala Desa di Pilkada 2013 dan juga Pilkada 2019.

B. PKK

1. Sejarah PKK

PKK ialah gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari *Seminar Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Pada tahun 1961, Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang mengajarkan 10 Segi Kehidupan Keluarga di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS) ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PKK, 2010).

Pada bulan Mei tahun 1962, Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) didirikan di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, untuk menyebarkan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Di sekitar tahun 1967, sebagian besar masyarakat di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menderita Honger Odeem (HO) dan kehidupan mereka sangat menyedihkan. Tergerak oleh kondisi ini, Ibu Isriati

Moenadi, sebagai istri Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan menginisiasi pendirian PKK di Jawa Tengah mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan. Pengurus PKK tersusun dari istri pimpinan daerah, tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki yang bekerja secara intensif untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK (PKK, 2010).

Setelah melihat keberhasilan PKK di Jawa Tengah, Presiden RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan program PKK di seluruh daerah di Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah meminta agar nama program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga diubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan menyalin surat tersebut kepada Gubernur seluruh Indonesia. Kemudian, pertemuan Rakernaslub PKK yang diadakan di Bandung pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2000 menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya menghasilkan keputusan terpenting yakni perubahan nama program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK, 2010).

PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang muncul dari lapisan masyarakat yang lebih rendah, yang fokusnya pada perempuan sebagai penggerak utama untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan, mengumpulkan, mengerahkan, serta membangun keluarga sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Keberhasilan PKK dalam memajukan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah hasil dari upaya kolaboratif antara perempuan sebagai penggerak utama dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam gerakan ini. PKK memiliki 10 program pokok, diantaranya: Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan

Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat (PKK, 2010).

2. Struktur Organisasi PKK Desa Cileungsi

Dijelaskan dalam Peraturan Kemendagri No 30 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, bahwa TP PKK Desa terdiri atas, ketua PKK, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja 1, kelompok kerja 2, kelompok kerja 3, dan kelompok kerja 4 (Kemendagri, 2020).

Adapun struktur organisasi PKK Desa Cileungsi diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. **Ketua PKK Desa Cileungsi : Hj. Kartika Sari**
- b. **Sekretaris : Mugiyanti**
- c. **Bendahara : Tuti Hernawati**
- d. **Pokja I : Nurhayati (Ketua Pokja I)**
Een Suryani
Panti Suspanti
- e. **Pokja II : Ema Kusmaesari(Ketua Pokja II)**
II Irawati
Rina Kustiarini
- f. **Pokja III : Ikah (Ketua Pokja III)**
Sifa Fauziah
Irma Maryani
- g. **Pokja IV : Lina Marlina (Ketua Pokja IV)**
Reny Haryanti
Sri Mulyani

3. Visi dan Misi PKK Desa Cileungsi

Visi : Mengembangkan bangga kencana, serta mengajak wanita-wanita di Desa Cileungsi untuk berkembang sesuai kemajuan zaman dengan berkembangnya teknologi.

Misi : PKK Desa Cileungsi ialah ingin mengembangkan bangga kencana, serta mengajak wanita-wanita di Desa Cileungsi untuk berkembang sesuai kemajuan zaman dengan berkembangnya teknologi. Adapun untuk mewujudkannya, PKK Desa Cileungsi mengadakan penyuluhan, pembinaan, latihan keterampilan, dan sosialisasi ke PKK tingkat RT dan juga RW sesuai dengan pokja masing-masing.

4. Tugas dan Fungsi PKK

Sebagai organisasi, PKK berperan untuk mendorong proses pembangunan. Tugas utama PKK melibatkan tanggung jawab utama dalam meningkatkan standar hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan keluarga. Adapun tugas dan fungsi PKK Dijelaskan dalam Peraturan Kemendagri No 30 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Tentang Tugas dan Fungsi PKK antara lain:

1. Untuk melaksanakan Gerakan PKK, tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 program pokok PKK.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki fungsi meliputi:
 - a. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK.
 - b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma.
- d. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Kemendagri No 30 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, bahwa kelompok kerja terdiri atas :

- 1. Kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
 - b. Gotong royong
- 2. Kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - a. Pendidikan dan keterampilan
 - b. Pengembangan kehidupan berkoperasi
- 3. Kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - a. Pangan
 - b. Sandang
 - c. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- 4. Kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - a. Kesehatan
 - b. Kelestarian lingkungan hidup
 - c. Perencanaan sehat

BAB IV

ASPIRASI DAN PERAN POLITIK PKK DALAM MENGADVOKASI PROGRAM KETAHANAN SOSIAL UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

A. Aspirasi PKK Desa Cileungsi

PKK memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam upaya membangun ketahanan di desa, PKK memiliki aspirasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberdayakan. Aspirasi PKK tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap pengembangan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui berbagai program dan inisiatif, PKK berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di desa, memastikan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

1. Permasalahan Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi

Desa Cileungsi berdekatan dengan ibukota sehingga permasalahan yang dihadapi cukup kompleks. Contoh permasalahan yang terjadi di Desa Cileungsi melibatkan anak-anak sebagai subjek konflik seperti halnya kenakalan remaja. Lain halnya juga dengan perempuan yang menghadapi tantangan yang cukup kompleks pula, seperti halnya dengan keadaan perempuan disana masih banyak perempuan yang bergantung dengan suaminya. Hal inipun dikonfirmasi oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Disini perempuan itukan masih ketergantungan dengan suami biasanya. Dan untuk anak-anak, dalam beberapa fase, tahapan ada balita, ada usia Paud, TK, SD, SMP, dan sebagainya” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi.

“Untuk perempuan di sini, intinya di Cileungsi ini kebanyakan itu yaaa, banyak yang mengandalkan usaha suami saja. Untuk yang bener-bener membantu atau bekerja itu jarang” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Selain perempuan, perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan perubahan yang sulit untuk diprediksi, sehingga anak-anak menjadi subjek kedua yang perlu untuk diperhatikan. Keresahan orang tua terhadap anak-anak yang terlalu sering bermain *gadget* menjadi perhatian penulis dalam melihat permasalahan yang ada di Desa Cileungsi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Untuk anak-anak dalam kondisi saat ini, anak-anak itu luar biasa, karena mungkin kebebasan, atau mungkin karena ini akibat dari majunya teknologi, banyak anak-anak ini selalu dan setiap hari memegang *gadget*. Artinya ini adalah suatu permasalahan. Hati-hati, karena mungkin orang tua juga kurang memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya dari *gadget* itu apa? Sehingga anak-anak diberi suatu media untuk mereka bermain. Nah kekhawatiran kami, karena di media sosial inikan sangat luas, hati-hati mereka masih belum memahami undang-undang yang ada di negara kita, hati-hati ya terutama dalam bermain media sosial tanpa adanya pengawasan orang tua itu adalah suatu kendala. Makanya kami selalu mensosialisasikan, hati-hati kepada bapak ibu warga, tolong dikontrol *gadget* dari anaknya masing-masing, karena dari media sosial itu banyak pengaruh dari anak-anak. Bahkan kalau dahulu itu, bapak guru, ibu guru yang mempengaruhi, bapak ibu, ustad ustadzah dari pengajian anak-anak yang mempengaruhi, sekarang ngga, *gadget* yang jadi penyakit, ini saya anggap yang jadi penyakit karena apa? Mereka belum bisa menempatkan *gadget*

itu fungsi untuk apa dan akibatnya bagaimana? Itu anak-anak, masih perlu banyak sekali dari kami, terutama pemerintahan dan perangkat lingkungan, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Karena khawatir anak-anak, terjerat dalam permasalahan yang muncul dari media sosial” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan diatas memberikan makna bahwa penggunaan *gadget* bagi anak-anak adalah penyakit yang harus diwaspadai dalam lingkup bermasyarakat. Hal ini pula yang menjadi upaya Perangkat Desa Cileungsi untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang penggunaan *gadget* bagi anak.

Selain tantangan dari anak-anaknya yang suka menggunakan *gadget*, Adapun tantangan lainnya yang dialami di Desa Cileungsi yang berkaitan dengan anak-anak. Salah satunya ialah kenakalan remaja. Hal inipun dijelaskan oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Untuk kenakalan remaja sendiri disini masih ada. Namanya remaja itu, tidak bisa lepas dari kenakalan. Karena itu adalah masa-masa mereka untuk menentukan sikap untuk ke depan di usia lanjutnya. Karena remaja yang penting kalo kami sih kenakalan remaja, Ketika masih bisa kami pantau, Ketika masih bisa kami arahkan, kami *Insyallah* selalu memberikan dorongan kepada remaja, satu jangan masuk kelingkaran narkoba, hati-hati narkoba itu juga merusak, narkoba itu satu penyakit yang luar biasa, makanya Desa Cileungsi dari 2018 itu sudah membentuk yang dinamakan ‘Desa Bersinar’ yaitu desa bersih dari narkoba. Dan itu berlanjut hingga tahun ini, dan ya *Alhamdulillah*. Karena di desa kami ini juga kami tidak munafik juga disini adalah tempat perputaran permainan narkoba, artinya kita wilayah transit jadi dari beberapa wilayah itu masuk ke kita. Makanya kita selalu sosialisasikan buat temen-temen, sosialisasikan kepada para

remaja, jangan sampai terjadi masuk kelingkaran narkoba” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa kenakalan remaja di Desa Cileungsi dianggap sebagai bagian dari masa remaja yang penting untuk menentukan sikap ke depannya. Sangat ditekankan pentingnya mendampingi dan memberikan arahan kepada remaja selama masa ini, terutama dalam mencegah masuknya remaja ke dalam lingkaran narkoba. Desa Cileungsi telah membentuk inisiatif “Desa Bersinar” sejak 2018 untuk menjadikan desa bebas dari narkoba, dan Perangkat Desa Cileungsi aktif mensosialisasikan pentingnya menjauhi narkoba kepada para remaja di desa tersebut. Diketahui juga bahwa Desa Cileungsi merupakan wilayah transit narkoba, dan oleh karena itu, upaya pencegahan sangat diperlukan.

Selain permasalahan remaja di atas, Desa Cileungsi pun memiliki tantangan dalam permasalahan remaja lainnya yakni yang berkaitan dengan masalah tawuran antar pelajar ataupun perkumpulan remaja. Hal inipun dijelaskan oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Kedua terkait hal yang sering terjadi yaitu tawuran antar anak sekolah, ataupun antar *genk*, itu yang menjadi perhatian kita juga, yang jelas kami dari Pemerintahan Desa Cileungsi sudah mendapatkan arahan dari bapak Kapolsek Cileungsi, bahwa akibat dari anak-anak kita, remaja-remaja kita ketika jam 10 malam tidak ada di rumah mohon dicari oleh orang tuanya karena ketika terjadi permasalahan, kalo tidak jadi tersangka ya jadi korbannya, itu yang selalu kita sampaikan ke perangkat lingkungan (RT, RW, dan lain sebagainya) tolong adek-adek remaja diarahkan ke hal yang positif” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut mengungkapkan permasalahan utama di Desa Cileungsi, yaitu tawuran antar anak sekolah dan antar *genk*. Pemerintahan Desa telah mendapat arahan dari Kapolsek untuk mengawasi remaja, dengan imbauan agar orang tua mencari anaknya jika tidak ada di rumah sebelum jam 10 malam. Perangkat lingkungan diminta untuk mengarahkan remaja ke hal-hal positif.

2. Program PKK Desa Cileungsi

Dalam merespons tantangan ketahanan sosial di lingkungan pedesaan, PKK Desa Cileungsi telah merancang dan melaksanakan berbagai program inovatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Program-program ini mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan pondasi yang kokoh bagi masyarakat desa. Adapun beberapa program PKK tersebut, sebagai berikut ini:

a. Aspek Pendidikan

Di dalam aspek pendidikan, PKK memiliki beberapa program seperti halnya Paaredi, Pembentukan PAUD, Sosialisasi Gemar Membaca, dan Cinta Kasih. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa:

“Ya sama Paaredi itu ke remaja, berdasarkan buku yang ada tentang Paaredi itu kan anak dan remaja di era digital, jadi itu tuh penyuluhannya ke BKR nah BKR itu Bina Keluarga Remaja itu dikasih pengarahan tentang anak-anak remajanya agar menjadi anak remaja yang bermanfaat atau berguna, jadi tidak salah kaprah, tidak narkobalah dan segala macam, tidak salah pergaulan” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Hal inipun diperkuat dengan pendapat dari Ibu Hesti selaku Ketua TP PKK Kecamatan Cileungsi:

“Kita ada Paaredi, Paaredi itu adalah pola asuh anak di era digital. Nah untuk kegiatannya sendiri itu adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimana peranan orang tua di zaman era digital saat ini” (wawancara, Hesti, 23 Juli 2023).

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa program Paaredi sendiri ialah program tentang pola asuh anak dan remaja era digital. Dari kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengedukasi para orang tua ataupun BKR, mengenai peran keluarga dalam membentuk karakter anaknya di era digital ini dengan menggunakan pola asuh yang tepat. Adapun BKR itu sendiri adalah Bina Keluarga Remaja, yaitu orang tua ataupun wali yang memiliki anak remaja.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“BKR itu Bina Keluarga Remaja, nah mereka ini biasanya itu keluarga yang memang memiliki anak remaja” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Adapun alasan diberlakukannya program Paaredi ini ialah lantaran di era saat ini yang bisa disebut juga dengan era digital ini, anak-anak itu lebih mudah untuk mengakses internet untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Sehingga pergaulan anak-anak terkhusus remaja itu sangat harus diperhatikan oleh orang tuanya agar para anak ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti, pergaulan bebas, tindakan *bullying*, dan yang paling parah itu penggunaan narkoba. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Karena sebagaimana kita ketahui, anak-anak zaman sekarang itu sudah lebih pintar daripada orang tuanya untuk memegang *gadget* yahh, kadang-kadang saya sendiripun masih nanya kepada anak

saya. Cuma rata-rata, kenapa ada program ini, yang pertama itu narkoba yang kita takutkan itu narkoba, yang kedua itu nonton yang tidak layak ditonton oleh anak sebelum usia 17 tahun, terus yang ketiga juga ada *bullying* yang termasuk juga disitu” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Hal inipun diperkuat dengan pendapat dari Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Karenakan gini, kadang kala gini anak ayo pegang Hp aja dikiranya mainan aja, padahal gak selalu begitu” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Dari alasan tersebut, maka terbentuklah program Paaredi ini di Cileungsi. Adapun kegiatannya dari program inipun bentuknya seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada orang tua ataupun BKRnya itu sendiri, lalu baru akan ke sekolah-sekolah, kemudian ke karang taruna. Adapun program mengenai Paaredi saat ini masih diadakan sosialisainya di kegiatan posyandu-posyandu lalu kemudian saat acara pengajian ataupun majlis ta’lim.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Kalau untuk saat ini, Paaredi itu baru hanya semacam sosialisasi saja mba, biasanya sosialisasinya tuh lebih ke di posyandu, karena banyak orang datang itukan ya ke posyandu. Terus yang kedua itu majlis ta’lim, itu tuh juga bisa. Sebenarnya di majlis ta’lim tuh justru lebih enak penyampaianya. Satu, jamaahnya banyak, terus apa yang ingin kita sampaikan juga kayanya lebih cepat sampai ke masyarakat, karena disitu ada peranan dari ustad dan ustadzah yang menyampaikan, ataupun *support* dari ustadzahnya, jadi itu lebih cepatlah. Kalo untuk penyuluhan ke remaja sendiri itu untuk saat ini belum mba karena biasanya paling nanti akan ada bunda paud ataupun sebagai bunda literasi, Cuma untuk saat ini kita belum bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan

paaredi ini, mungkin *next*lah tahun depan udah mulai bisa. Adapun sasarannya untuk anak SMP. Untuk kegiatannya itu nanti dilaksanakan tergantung dengan yang ada di kecamatan, misalnya paaredi ini mau dilaksanakan perbulankah atau per 3 bulankah. Atau mungkin kalo sekarang rata-rata sih sekarang kalo sosialisasi di majlis ta'lim itu pertiap bulan mba. Misalnya ada pengajian disini tanggal berapa, ya kita datang” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Hal inipun dikonfirmasi pula oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya itu memang belum kita jalankan secara penuh, sejauh ini baru penyuluhan. Untuk penyuluhannya itu kita melalui posyandu dan melalui BKR itu sendiri. Inti penyuluhannya itu agar orang tua itu peduli dengan era digital ini. Karenakan gini, kadang kala gini anak ayo pegang Hp aja dikiranya mainan aja, nah itu orang tua yang gak paham nah itu yang dikasih pemahaman. Dan memang seharusnya untuk kegiatan ini tuh dilakukannya itu penyuluhannya juga ke sekolah-sekolah. Tapi untuk paaredi ini memang harusnya itu BKRnya dulu yang di suluh, karena kalo sudah bina keluarga yang memiliki anak remaja otomatis mereka tidak menyalahkan anaknya selalu bermain *gadget*, baru setelah itu ke karang taruna, lalu ke sekolah-sekolahan. Dan nanti kemungkinan akan bekerja sama dengan Karang Taruna dan sekolah-sekolah dalam kegiatannya ini. Karena cenderung pihak sekolah itu harus memantau siswanya” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa kegiatan terkait program (Paaredi) belum sepenuhnya dijalankan, saat ini baru berupa penyuluhan. Penyuluhan dilakukan melalui posyandu dan BKR (Bina Keluarga Remaja), dengan fokus pada pemahaman orang tua terhadap era digital. Tujuannya adalah agar orang tua lebih

memahami peran *gadget* dalam kehidupan anak-anak, menghindari persepsi bahwa *gadget* hanya mainan. Selanjutnya, pernyataan menyoroti pentingnya penyuluhan di sekolah-sekolah, dan menekankan bahwa BKR harus menjadi prioritas dalam penyuluhan Paaredi. Hal ini karena dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang memiliki anak remaja, dapat mencegah kesalahpahaman terhadap peran *gadget*. Selain itu, kemungkinan adanya kerjasama dengan Karang Taruna dan sekolah-sekolah diungkapkan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam kegiatan ini, dengan peran sekolah yang cenderung memantau siswanya.

Gambar 4. 1 PAUD Binaan PKK



(Sumber: Arsip Kegiatan PKK Desa Cileungsi)

Selain adanya Paaredi, program PKK di aspek pendidikan di sini juga ada pembentukan PAUD. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini, sebuah program pendidikan untuk anak-anak usia 0-6 tahun. Tujuannya adalah memberikan stimulasi dan pembelajaran sesuai perkembangan anak, melibatkan kegiatan kreatif, permainan, dan lagu. PAUD membantu membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan anak sebelum masuk ke pendidikan formal. Dengan adanya PAUD juga diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak yang lebih baik lagi sedari dini di Desa Cileungsi.

Adapun awal pembentukan PAUD di Desa Cileungsi sendiri itu dilaksanakannya pada saat Posyandu sampai akhirnya ada beberapa PAUD yang bisa menjadi PAUD mandiri. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kalau pembentukan PAUD kita bekerjasama dengan posyandu juga. Jadi posyandu yang terintegrasi, jadi ada tri bina biasanya nah di tambah PAUD itu. Nah jadi PAUD itu awal mulanya dari BKB (Bina Keluarga Anak Balita). Nah jadi ibunya disuluh tentang cara pengasuhan dan sebagainya memberi makanan nah anaknya di ajarin yang misalnya gerakan kasar, gerakan apa gitu dan lain sebagainya” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Hal tersebutpun dikonfirmasi oleh Ibu Reni selaku Anggota PKK Desa Cileungsi:

“Sebenarnya PAUD itu tadinya itu kaya rumah belajar biasa begitu terus karenakan harus ada akreditasi dan lain-lain biar masuk di yayasan. Jadi kami para PKK itu membuat seperti rumah belajar seperti itu” (wawancara, Reni, 2 Agustus 2023).

Selain pihak PKK, jika PAUD Binaan tersebut sudah berkembang maka untuk tenaga pengajarnya itu ditentukan oleh pihak wilayah PAUD tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Reni selaku Anggota PKK Desa Cileungsi.

“Untuk orang-orang yang mengajar itu nanti yang menentukannya itu ya wilayah. Cuma untuk nanti perizinan dan lain-lain itu nanti PKK, kalau memang mau nanti di rangkul oleh PKK. PKK yang ngurus, nanti bisa menjadi rumah belajar itu PKK yang ngurus. Kalau mereka sudah menjadi TK atau PAUD itu sudah masuk di yayasan” (wawancara, Reni, 2 Agustus 2023).

Hal tersebutpun dikonfirmasi oleh Ibu Risna selaku Tenaga Pengajar PAUD:

“Iya, dulu yang meminta saya untuk mengajar di PAUD binaan ini itu Ibu RW” (wawancara, Risna, 27 November 2023).

Selain Ibu Risna, hal inipun dikonfirmasi oleh Ibu Nurlaeli selaku Ibu RW 02 Desa Cileungsi:

“Untuk pengajarnya sendiri, kebetulan waktu itu memang saya yang menentukan selaku ibu RW” (wawancara, Nurlaeli, 27 November 2023).

Dari pernyataan di atas, mengungkapkan bahwa untuk penentuan tenaga pengajar PAUD sendiri itu ditentukan oleh wilayah PAUD tersebut. Hanya saja untuk perizinan dan lain-lainnya yang mengurus itu PKK, jika memang PAUD tersebut mau dirangkul oleh PKK. Dan jika PAUD tersebut sudah menjadi TK itu sudah masuk ke yayasan.

Dalam ranah aspek pendidikan juga ada program PKK yang lainnya yakni, Sosialisasi Gemar Membaca. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ema selaku Ketua Pokja 2 PKK Desa Cileungsi:

“Gemar membaca ini baru dimulai sekarang-sekarang ini, baru kita coba di sosialisasikan di tingkat RW dahulu, untuk programnya itu dilakukan selama 80 menit. Tujuan kegiatan inipun untuk meningkatkan minat membaca masyarakat terutama pelajar” (wawancara, Ema, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa program Gemar Membaca dilakukan selama 80 menit yang dilakukan di RW. Program Gemar Membaca merupakan inisiatif untuk mendorong minat membaca di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar.

Gambar 4. 2 Sosialisasi Cinta Kasih



(Sumber : Arsip Kegiatan PKK Desa Cileungsi)

Di aspek pendidikan sendiri program kegiatannya selain untuk anak-anak, ada juga program yang diadakan untuk para lansia yaitu program Cinta Kasih. Program ini sendiri ialah sebagai penguatan terhadap lansia agar para lansia ini bisa menjadi lansia yang mandiri. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurhayati selaku Ketua Pokja I PKK Desa Cileungsi:

“Jadi dalam kegiatan ini itu kami melakukan penyuluhan atau saat dipengajian-pengajian ataupun posyandu memberikan penyuluhan cinta kasih terhadap orang tua, terhadap lansia, jadi disuluh itu biasanya keluarga lansianya gitu begitu sistemnya penyuluhan agar pola asuh lansia itu bisa mandiri atau dia tidak ketergantungan begitu sih” (wawancara, Nurhayati, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kegiatan melibatkan penyuluhan, terutama di pengajian, untuk memberikan pemahaman tentang cinta kasih terhadap orang tua dan lansia. Fokusnya adalah pada keluarga yang memiliki lansia, dengan tujuan mendorong pola asuh yang mandiri agar lansia tidak ketergantungan pada orang lain. PKK berperan dalam memberikan panduan kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian lansia melalui sistem penyuluhan.

b. Aspek Kesehatan

Di dalam aspek kesehatan, PKK memiliki beberapa program seperti halnya Pembentukan Ketahanan Pangan, Penyuluhan B2SA, Pelatihan Kader Posyandu, Gotong Royong, dan Pemeriksaan IVA Tes terhadap WUSPUS.

Gambar 4. 3 Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Cileungsi



(Sumber : Arsip Kegiatan PKK Desa Cileungsi)

Pembentukan Ketahanan Pangan, dalam kegiatan ini PKK bekerjasama dengan kader ketahanan pangan atau bisa disebut juga dengan KRL. Adapun kegiatan dalam program ini ialah dengan melakukan penanaman tanaman hidroponik seperti pokcoy, kangkung, dan bayam. Untuk lokasinya itu biasanya dilakukan di wilayah-wilayah perumahan. Selain produk nabati, dalam program inipun ada juga produk hewani yaitu budidaya lele dalam ember. Hal inipun dipaparkan oleh Ibu Ikah selaku Ketua Pokja 3 PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya itu kita bekerja sama dengan kader ketahanan pangan atau KRL, yaitu penanaman modelnya seperti hidroponik itu menanam pokcoy, kangkung, dan bayam adanya dilakukan di wilayah-wilayah perumahan biasanya dan ini sudah berhasil. Dan selain itu kita juga ada produk hewani, untuk hewani sendiri itu kita budidaya lele dalam damber” (wawancara, Ikah, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan tersebut melibatkan kerjasama dengan kader ketahanan pangan atau KRL. Kegiatan utamanya adalah penanaman model hidroponik dengan menanam pokcoy, kangkung, dan bayam. Penanaman ini dilakukan di wilayah-wilayah perumahan biasanya dan telah berhasil. Selain itu, ada juga kegiatan budidaya hewan, khususnya budidaya lele dalam damber. Keseluruhan aktivitas ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengintegrasikan pertanian hidroponik dan budidaya lele dalam skala komunitas atau perumahan.

Adapun yang sudah dirasakan dari kegiatan ini ialah PKK Desa Cileungsi sudah melakukan Panen Raya. Dari hasil panen tersebut, PKK menjualnya ke masyarakat sekitar. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Ikah selaku Ketua Pokja 3 PKK Desa Cileungsi:

“Dari kegiatan ini *Alhamdulillah* kita sudah merasakan hasilnya. Kita sudah melakukan panen raya, ikan lele juga sudah di panen. Dan kamipun sudah merasakan hasil dari keduanya itu seperti lele dan sayurannya itu kita jual ke masyarakat sekitar. Jadi yang tadinya mereka beli di pasar, sekarang kita sudah ada kegiatan itu jadi kita memanfaatkan program ini” (wawancara, Ikah, 23 Juni 2023).

Hasil dari panen inipun tidak hanya bisa dijual tetapi juga disumbangkan ke warga yang tidak mampu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hj. Luli selaku Anggota BPD Desa Cileungsi.

“Untuk seperti kelompok ketahanan pangan itu, kegiatannya menanam sayur dan hasilnya itu bisa di jual dan di sumbangkan ke masyarakat yang kurang mampu” (wawancara, Hj. Luli, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hasil positif telah diraih dari kegiatan yang dilakukan. Telah dilakukan panen raya, termasuk panen ikan lele. Hasil panen tersebut, baik ikan lele maupun sayuran, dijual kepada masyarakat sekitar. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa program ketahanan pangan memberikan dampak positif. Selain diarahkan untuk kegiatan ekonomi dengan menjual produknya, program ini juga memiliki dimensi sosial dengan menyumbangkan hasilnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga ikut berkontribusi pada pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sekitar.

Untuk program selanjutnya ada program penyuluhan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Kegiatan ini ialah mensosialisasikan tentang aneka ragam makanan bergizi dan seimbang. Hal ini dijelaskan pula oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Penyuluhannya di posyandu-posyandu, seperti semisal jika kita sudah makan nasi kita tidak boleh makan lauknya karbo lagi, karena itu sama-sama karbo. Kaya misalnya mie, kita kalo makan nasi itu tidak boleh lauknya itu mie. Nah itu penyuluhannya tuh seperti itu. Jadi misalnya menu sehat gizi seimbang misalnya kaya ya harus ada sayur, ada buah, ada lauk pauknya dari hewani maupun nabati. Kaya gitu, biasanya kaya gitu. Jadi gizinya harus seimbang” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan B2SA ini dilakukannya di posyandu. Adapun bentuk kegiatannya ialah PKK mensosialisasikan pentingnya pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Contohnya, menghindari konsumsi karbohidrat berganda dalam satu waktu, seperti nasi dan mie bersamaan. Penyuluhan ini juga mencorakkan menu sehat yang melibatkan sayur, buah, serta lauk pauk dari sumber hewani dan nabati untuk mencapai keseimbangan gizi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama ibu dan anak balita, mengenai pola makan yang mendukung kesehatan tubuh.

Gambar 4. 4 Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu



(Sumber: Kegiatan PKK Desa Cileungsi)

Selanjutnya ada program Pelatihan Kader Posyandu. Dalam pelatihan ini merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan kader posyandu agar mampu berperan serta dalam mengembangkan program kesehatan desa. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya tentang pembukuan, pelatihan, pelaporan, dan pencatatan gitu-gitu dan untuk pengadaannya gak tentu. Kalo kita pelatihan itu, peningkatan kapasitas ya neng, namanya itu setiap tahun kita adakan tapi kita dari dana bantuan provinsi. Tapi kalo dari puskesmas itu tergantung dari puskesmasnya” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Hal inipun di konfirmasi oleh Ibu Marmi selaku Anggota Kader Posyandu Desa Cileungsi:

“Iya, untuk kegiatannya itu yaa kita kaya di ajarin gimana caranya buat pembukuan, terus pelaporan, dan gimana caranya nimbang atau ngukur yang bener itu gimana itu disitu kita diajarin tuh neng, biasanya disitu juga ada petugas dari Puskesmas Cileungsi juga” (wawancara, Marmi, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kegiatan dalam pelatihan kader posyandu ini yaitu berkaitan dengan kegiatan administrasi seperti pembukuan, pelatihan pelaporan, dan pencatatan. Dana dalam kegiatan ini berasal dari bantuan provinsi dan puskesmas. Pelatihan dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kapasitas peserta. Kegiatan melibatkan petugas dari Puskesmas Cileungsi dan diselenggarakan dengan tujuan peningkatan keterampilan praktis peserta dalam bidang tersebut.

Selanjutnya dalam aspek kesehatan, PKK memiliki Program Gotong Royong yang diadakan di lingkungannya setiap bulannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nurhayati selaku Ketua Pokja I PKK Desa Cileungsi:

“Ya biasanya kitakan di lingkungan itu suka ada kegiatan RT itu gotong royong, biasanya bersih-bersih dan diadakannya itu gak nentu, kadang-kadang ya sebulan sekali gimana geraknya dari RT saja” (wawancara, Nurhayati, 11 Juli 2023).

Hal inipun sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Gotong royong itu dilakukan setiap bulan di awal bulan pada *start* pertemuan di kantor desa. Nah kalo gotong royongnya itu tertentu, gotong royongnya itu kita hanya mengikuti bagaimana masyarakat yang ada gotong royong. Jadi misal dimana ada gotong royong, kita kunjungan gitu jadi *rolling* kegiatannya se Desa Cileungsi gitu” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan di atas mengatakan bahwa gotong royong di Desa Cileungsi itu dilakukan paling tidak sebulan sekali di setiap wilayahnya. Dan pihak PKK melakukan kunjungan tersebut dengan bergantian di setiap wilayah Desa Cileungsi.

Gambar 4. 5 Kegiatan Penyuluhan IVA Test



(Sumber : Arsip Kegiatan PKK Desa Cileungsi)

Dalam aspek kesehatan, PKK juga memiliki program Pemeriksaan IVA Tes terhadap WUSPUS. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Reni selaku Anggota Pokja 4 PKK Desa Cileungsi:

“Dan kita juga ada di bidang kesehatan itu kaya IVA Test. IVA Test itu seperti test kanker rahim. Dan dalam kegiatannya ini itu didampingi oleh pihak Puskesmas. Itu biasanya kita dapat undangan dari Puskesmas untuk pelayanan IVA Test” (wawancara, Reni, 2 Agustus 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PKK terlibat dalam bidang kesehatan, khususnya dalam kegiatan IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat), yang merupakan tes untuk mendeteksi kanker rahim. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mereka didampingi oleh pihak Puskesmas. Prosesnya biasanya dimulai dengan menerima undangan dari Puskesmas untuk mengikuti layanan IVA Test. Artinya, kerjasama dengan Puskesmas sangat penting dalam mendukung pelaksanaan uji skrining kanker rahim ini.

Dalam hal ini, dijelaskan pula mengenai WUSPUS sendiri oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Wuspus itu kan Wanita usia subur, nah kegiatannya itu biasanya dilakukan penyuluhan, kaya semisal untuk Wanita usia subur (WUS) dilakukan sosialisasi kepada wanita yang menuju pernikahan atau sosialisasi mengenai penundaan usia pernikahan. Sedangkan untuk PUS sendiri atau pasangan usia subur itu sosialisasinya dengan melakukan penyuluhan tentang penggunaan KB kaya gitu-gitu sih neng. Untuk kegiatannya itu dilakukan disaat posyandu dan dilakukan dengan pihak puskesmas juga” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Penjelasan dari Ibu Mugiyanti inipun sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Reni selaku Anggota Pokja 4 PKK Desa Cileungsi:

“Selain itu ada pula ada BKR. BKR itu di remaja, kegiatannya itu reproduksinya model konselingnya itu biasanya perihal KB, perihal seks bebas dan lain-lainnya itu, kemudian rahim yang masih muda karenakan sekarang ini banyak kasus yang hamil di bawah umur. Untuk BKR itu dibentuk per posyandu juga atau per RW. BKR itu Bina Keluarga Remaja. Jadi remaja yang menginjak mau menikah itu yang harus di bina neng. Jadi kaya dari sebelum menjadi catin, nanti jadi catin, setelah menikah pasca menikah tuh terus nanti saat setelah hamil, itu nanti harusnya didampingi itu. Dan untuk

kegiatannya itu perposyandu yang bekerjasama juga dengan TPK (Tim Penggerak Keluarga). (wawancara, Reni, 2 Agustus 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan kegiatan penyuluhan untuk wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS), termasuk Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk remaja yang akan menikah. Kegiatan dilakukan di posyandu dengan kerjasama Tim Penggerak Keluarga (TPK) untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi, penundaan pernikahan, penggunaan kontrasepsi, dan isu-isu seperti kehamilan di bawah umur serta seks bebas. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan praktek kesehatan reproduksi di masyarakat.

c. Aspek Pemberdayaan Ekonomi

Di dalam aspek ekonomi, PKK memiliki beberapa program seperti halnya Pembinaan UP2K di wilayah RW, Pelatihan Pengelolaan UMKM, mengadakan Pelatihan Perempuan.

UP2K ialah singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Dalam program ini memiliki maksud sebagai kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok atau perorangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Adapun modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (Susi Handayani, 2019). Hal inipun di konfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya ini itu seperti mengajarkan untuk membuat usaha seperti membuat jajanan seperti kue lalu di jual. sebenarnya dulu program ini sudah dilaksanakan, hanya saja sempat vakum dan ini kegiatannya berkelompok dan untuk usahanya itu hanya semusim aja. Jadi dia bermusim dalam arti kata dalam waktu bulan puasa. Jadi mereka membuat jajanan. Jadi nanti modalnya berapa itu di

catat, lalu hasilnya berapa itu di catat, terus di bagi dari biasa produksinya berapa gitu. Kalo UP2K itu kami memang kemarin sudah menargetkan di kenanga 6 ini, usahanya keripik bawang akan tetapi sama desa belum di SK kan. Untuk kegiatan ini sudah dilakukan dan sasarannya itu kepada warga kelas menengah ke bawah” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang program UP2K di Desa Cileungsi yang dijalankan oleh PKK, dalam program tersebut masyarakat dilatih untuk membuat usaha makanan seperti halnya pembuatan kue atau keripik bawang. Program ini dilaksanakan secara berkelompok, bersifat musiman selama bulan puasa, dengan pencatatan modal, hasil, dan pembagian keuntungan. Diketahui pula sebelumnya PKK Desa Cileungsi pernah mengadakan kegiatan ini hanya saja sempat berhenti, lalu saat ini akan dihidupkan kembali program ini yang menargetkan usaha keripik bawang, namun masih menunggu persetujuan dari desa. Kegiatan ini telah dilakukan, dengan sasaran utama pada warga kelas menengah ke bawah. Dengan adanya UP2K ini, dapat membantu penguatan keuangan dalam keluarga. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Keuangan sehat di keluarga, itu si istri bisa memiliki keuangan sendiri dengan adanya UP2K. Jadi UP2K itu kan di situ juga ada penguatan keuangan di dalam keluarga” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya UP2K (Usaha Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), istri dapat memiliki keuangan sendiri. UP2K adalah program pemberdayaan yang memberikan dukungan finansial dan memberdayakan anggota keluarga, khususnya istri, untuk memiliki usaha mandiri. Melalui UP2K, terjadi penguatan keuangan di dalam keluarga dengan memberikan kesempatan pada istri untuk memiliki sumber

pendapatan sendiri, yang dapat berdampak positif pada keuangan keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya ada program Pelatihan Pengelolaan UMKM. Adapun program ini dilakukan guna mengembangkan kreatifitas warga melalui usaha mikro kecil dan menengah. Adapun program ini bertujuan agar menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam kegiatan ini PKKpun bekerjasama dengan pihak luar. Hal ini di konfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“PKK dalam mengajarkan usaha UMKM inipun ada kalanya bekerja sama dengan pihak luar, dulu kita pernah bekerjasama dengan pihak luar, lalu kita memberikan modal, alat-alat juga kepada para pelaku UMKM ini” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa PKK berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengajarkan dan mendukung usaha UMKM. Mereka bekerja sama dengan pihak luar, memberikan modal, alat-alat, dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan memastikan kelangsungan usaha UMKM. Hal inipun dikonfirmasi pula oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Baru-baru ini kita kemarin baru mengadakan pelatihan sertifikasi halal MUI bagi ibu-ibu yang memiliki usaha, sama pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi *online*, dan pelatihan pengajuan sertifikasi produk halal untuk TP PKK Desa se Kecamatan Cileungsi yang bekerjasama dengan aplikasi *Grab*” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

PKK baru-baru ini mengadakan pelatihan sertifikasi halal MUI dan penggunaan aplikasi *online* yang bekerjasama dengan Grab. Pelatihan ini ditujukan untuk para pelaku usaha. Mereka diberikan pemahaman tentang sertifikasi halal MUI dan keterampilan penggunaan aplikasi *online* untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan manajemen usaha. Kerja sama dengan Grab juga mencakup pelatihan pengajuan sertifikasi produk halal.

Selanjutnya ialah ada program pelatihan perempuan. Adapun program ini dilakukan guna meningkatkan *skill* perempuan di Desa Cileungsi agar lebih terasah. Adapun tujuan dilakukan kegiatannya ini ialah untuk meningkatkan keterampilan perempuan sehingga *skill* tersebut dapat dimanfaatkan, dan dapat melatih para perempuan disana agar tidak selalu bergantung dengan suaminya, selain itupun dengan kemampuan tersebut para perempuan disana bisa membantu penguatan ekonomi keluarga juga. Kegiatan pelatihan ini dijelaskan pula oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya ada juga seperti dilatih untuk memiliki UMKM, karenakan itukan usaha untuk meningkatkan penghasilan di rumah tangga, dapat membantu kepala keluarga mendapatkan penghasilan gitu. Dan sejauh ini sudah banyak yang terbantu akan ini” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Hal inipun di konfirmasi oleh Ibu Hj. Luli selaku Anggota BPD Desa Cileungsi:

“Karena kita berada di wilayah perkotaan, jadi pelatihan perempuan itu ada pasti. Untuk kegiatan pelatihannya itu seperti diajarin buat kue, menjahit, terus dalam ketahanan pangan juga ada seperti diajari bagaimana memanfaatkan lahan yang sedikit dengan bercocok tanam seperti hidroponik. Intinya itu pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill dan juga penghasilan ibu-ibu” (wawancara, Hj. Luli, 11 Juli 2023).

Dari pernyataan di atas, dikatakan bahwa kegiatan PKK yang memberikan pelatihan kepada perempuan untuk memiliki UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) sebagai upaya meningkatkan penghasilan rumah tangga. Berada di wilayah perkotaan, kegiatan pelatihan difokuskan pada berbagai keterampilan, termasuk membuat kue, menjahit, dan ketahanan pangan dengan pendekatan seperti hidroponik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan dan penghasilan perempuan serta memberikan dukungan kepada kepala keluarga dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Pelatihan ini diakui telah membantu banyak ibu-ibu di wilayah tersebut.

Desa Cileungsi memiliki permasalahan terkait ketahanan sosial yang berpengaruh kepada beberapa subjek. Pertama, adanya ketergantungan perempuan pada suami sehingga diperlukan pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Kedua, ketergantungan anak dengan *gadget* yang memerlukan perubahan sudut pandang orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Ketiga, kenakalan remaja berupa kerentanan mereka terhadap peredaran narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran. PKK Desa Cileungsi melalui programnya berusaha untuk memecahkan permasalahan tentang ketahanan sosial.

Dalam pembahasan tentang perempuan di Desa Cileungsi, penulis melihat bahwa ketergantungan perempuan pada suami menjadi hal yang lumrah terjadi. PKK Desa Cileungsi merespon permasalahan tersebut dengan beberapa upaya yang melibatkan perempuan itu sendiri, seperti dalam program UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan memberdayakan anggota keluarga, khususnya istri, untuk memiliki usaha mandiri, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Keck dan Sakdapolrak melihat program ini sebagai suatu upaya dalam mewujudkan ketahanan sosial. Meminjam pisau analisis mereka, kemampuan untuk mengatasi permasalahan atau *coping capacities* adalah kemampuan seseorang dalam menangani dan mengatasi situasi yang sulit dengan sumber daya yang tersedia, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi seseorang setelah mengalami kejadian yang berpotensi merugikan. Melalui

UP2K, terjadi penguatan keuangan di dalam keluarga dengan memberikan kesempatan pada istri untuk memiliki sumber pendapatan sendiri, yang dapat berdampak positif pada keuangan keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya, kemampuan untuk beradaptasi atau *adaptive capacities* yang bermakna bahwa pengalaman masa lalu dapat menjadi inspirasi untuk membentuk langkah mitigasi resiko yang akan terjadi di masa depan. Hal ini terlihat pada program Pelatihan Pengelolaan UMKM. Adapun program ini dilakukan guna mengembangkan kreatifitas warga melalui usaha mikro kecil dan menengah. Program ini memberikan makna bahwa selain perempuan bisa mandiri, ada upaya berkelanjutan untuk memitigasi resiko ketergantungan terhadap suami melalui pengelolaan UMKM.

Perempuan juga perlu melalui proses bertransformasi ke arah yang lebih baik. Keck dan Sakdapolrak memberikan pandangan aspek ketiga berupa *transformative capacities* yang bermaksud kemampuan seseorang dalam mengakses bantuan dan sumber daya dari berbagai organisasi pemerintah dan masyarakat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan memperkuat ketahanan masyarakat. Hal ini nampak dalam upaya PKK Desa Cileungsi melalui program pelatihan perempuan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan *skill* perempuan di Desa Cileungsi agar lebih terasah. Kegiatan spesifiknya difokuskan pada berbagai keterampilan, termasuk membuat kue, menjahit, dan ketahanan pangan dengan pendekatan seperti hidroponik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan, memberikan dukungan kepada kepala keluarga, serta memberikan penghasilan kepada perempuan itu sendiri.

Subjek lain yang tak kalah penting adalah permasalahan anak dan remaja yang ada di Desa Cileungsi. Permasalahan tersebut tertuang dalam realita kehidupan berupa kecanduan anak pada *gadget*, permasalahan remaja terhadap narkoba, serta maraknya tawuran antar *genk* pada remaja. PKK kemudian merespon dengan beberapa programnya seperti: paaredi dan BKR. Mengutip Keck dan Sakdapolrak (2013) tentang aspek ketahanan sosial, PKK memiliki kemampuan *coping capacities* yang terdapat pada program paaredi karena

memasuki era digital yang tanpa batas, pergaulan anak-anak dan remaja perlu diperhatikan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat berupa pergaulan bebas, tindakan *bullying*, dan penggunaan narkoba. Walaupun program ini belum terlaksana secara maksimal, namun sosialisasi telah digencarkan kepada orang tua melalui kegiatan posyandu, pengajian dan majelis ta'lim. Program ini memberikan makna bahwa sosialisasi pada orang tua yang memiliki anak-anak dan remaja adalah salah satu langkah awal dalam mengatasi dan menangani situasi sulit yang ada di Desa Cileungsi demi membentuk ketahanan sosial.

B. Strategi PKK dalam Advokasi

Adapun dalam hal ini, strategi PKK dalam mengadvokasikan program-programnya tersebut yakni melalui kegiatan formal maupun informal. Seperti halnya saat kegiatan Musdes, Musrenbangdes, penyuluhan maupun sosialisasi, dan lain sebagainya.

Kegiatan formal yang dilakukan oleh PKK dalam mengadvokasi program-programnya ialah seperti saat Musdes dan juga Musrenbangdes yang dilakukan di kantor desa. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Setiap musrenbangdes itu kita hadir dan kalo memberikan aspirasi-aspirasi itu melewati tulisan. Jadi misalnya nih, minggu depan ada musrenbang nah kami sudah membuat ajuan-ajuan itu, nah kaya gitu. Jadi disana itu hanya yang melihat atau yang membicarakan hanya DPMD sama dari Sekertaris Desa. Jadi ibu hanya mengajukan, mendengarkan apakah sudah dibacakan atau belum dari pengajuan-pengajuan itu” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), PKK hadir untuk mengajukan aspirasi yang telah ditulis sebelumnya kemudian pada saat Musrenbangdes tersebut mereka menunggu ajuan-ajuannya dibacakan oleh perangkat desa. Diskusi lebih lanjut dan evaluasi dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMD) dan Sekretaris Desa. Hal inipun dikonfirmasi oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Iya, PKK kami undang juga dalam Musdes ataupun Musrenbangdes. Dan merekapun aktif juga menyampaikan aspirasinya” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa PKK diundang untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain hanya diundang, PKK juga aktif dalam menyampaikan aspirasinya dalam forum-forum tersebut. Dengan kata lain, PKK tidak hanya menjadi peserta dalam pertemuan desa dan perencanaan pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki peran yang diakui dan memainkan peran penting dalam proses perencanaan dan pengembangan desa, khususnya dalam konteks aspirasi dan kebutuhan perempuan dan keluarga.

Selain mengadvokasikan programnya tersebut melalui kegiatan formal seperti Musdes maupun Musrenbangdes. PKK juga mengadvokasikan programnya itu dengan kegiatan informal seperti dengan melobi kepada pihak perangkat desa untuk pengajuan beberapa programnya. Hal inipun di konfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Selain kegiatan formal kamipun juga mengajukan program itu dengan kegiatan informal juga, seperti misalnya kami melobi pihak desanya. Jadi kita bicara dulu dengan Kepala Desa, sama Sekertaris Desa juga, dan sama bendahara desa juga. Dan selain pengajuan di ranah formal, di ranah informalpun kita ditanya seperti ‘*alasanya apa mengajukan program ini?*’ gitu” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa selain mengikuti kegiatan formal, mereka juga mengajukan program melalui pendekatan informal. Ini melibatkan komunikasi langsung dengan pihak desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa sebelum mengajukan secara resmi. Dalam proses informal ini, mereka membahas program, dan pihak desa

menanyakan alasan di balik pengajuan program tersebut. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk berdialog sebelum memasuki tahap formal pengajuan. Hal inipun dikonfirmasi oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa:

“Yaa, PKK dalam mengadvokasi program tersebut ke Perangkat Desa itu selain dari kegiatan formal seperti musdes maupun musrenbangdespun mereka juga selalu terlibat dalam kegiatan informal juga” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa PKK tidak hanya terlibat dalam kegiatan formal seperti Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tetapi juga aktif dalam kegiatan informal untuk mengadvokasi program tersebut kepada perangkat desa. Aktivitas informal ini melibatkan upaya komunikasi dan pendekatan langsung dengan perangkat desa di luar forum formal, menciptakan peluang untuk berdiskusi dan menjelaskan programnya secara lebih personal dan mendalam.

Adapun aspirasi-aspirasi program yang disampaikan oleh PKK ini seputaran program untuk keluarga, khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi:

“Untuk proker PKK sendiri juga, rata-rata itu program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dan untuk program-programnya itu banyak yaa, ada program penelitian, penyuluhan ibu dan anak dan itupun menjadi tanggung jawab dari PKK Desa Cileungsi” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Hal yang disampaikan oleh Ibu Hj. Luli selaku Anggota BPD Desa Cileungsi:

“Iya untuk keterwakilan perempuan di Desa itu ada PKK. Adapun program yang diajukan PKK itu ya salah satunya tentang posyandu, kesehatan lansia, rumah sehat, ketahanan pangan, ataupun pelatihan yang dapat meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga seperti ternak ikan

lele, menjahit, atau pembuatan kue-kue” (wawancara, Hj. Luli, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa program kerja PKK terutama fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Program-program tersebut mencakup berbagai kegiatan, termasuk penelitian, penyuluhan untuk ibu dan anak, dan berbagai inisiatif lainnya. PKK Desa Cileungsi memiliki tanggung jawab khusus terkait program-program ini. Selain itu, PKK berkontribusi pada keterwakilan perempuan di Desa. Program yang diusulkan oleh PKK melibatkan berbagai aspek, seperti posyandu, kesehatan lansia, rumah sehat, ketahanan pangan, dan pelatihan untuk meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga, seperti usaha ternak ikan lele, keterampilan menjahit, atau pembuatan kue-kue. Keseluruhan, ini mencerminkan peran PKK dalam mendukung kesejahteraan dan pengembangan komunitas dengan fokus pada perempuan dan anak-anak.

Adapun dalam penyampaian aspirasinya tersebut, program PKK tidak selalu diterima oleh pihak desa, karena memang ada beberapa pertimbangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Beberapa program itu ya *Alhamdulillah* banyak sih di terima, nah *Allhamdulillah* di dengar walaupun tidak sepenuhnya di *acc*” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Hal inipun dikonfirmasi juga oleh Ibu Hj. Luli selaku Anggota BPD Desa Cileungsi:

“Tidak semuanya langsung di Acc, kalau untuk kesehatan biasanya langsung jadi prioritas. Kaya sekarang lagi pelaksanaan ketahanan pangan. Beberapa yang diajukan tersebut itu masih di pilih lagi berdasarkan skala prioritasnya, karenakan menyesuaikan dengan anggaran yang di dapat juga” (wawancara, Hj. Luli, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa beberapa program yang diajukan oleh PKK telah diterima dengan baik, meskipun tidak semua langsung disetujui. Meskipun tidak semua program langsung diakomodasi, khususnya untuk bidang kesehatan, program-program tersebut mendapat perhatian dan dianggap sebagai prioritas. Pemilihan program yang akan diimplementasikan masih bergantung pada skala prioritas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, program yang dipilih dan diimplementasikan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah diperoleh, tetapi tetap memperhatikan urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam mengadvokasikan program-programnya tersebut PKKpun bekerjasama dengan pihak desa, termasuk dalam membangun mitra kerjanya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekretaris PKK Desa Cileungsi:

“Kita saling bekerjasama kaya semisal kita selalu berkomunikasi, selalu kita berunding, selalu kita ada lokbul atau loka karya bulanan itu kita selalu juga monev dengan perangkat desa” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut mencerminkan kerjasama yang erat antara PKK dengan perangkat desa, termasuk komunikasi rutin, evaluasi bersama. Hal inipun dikonfirmasi oleh Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa:

“Yaa pasti, karenakan sumbernya itukan semua dari desa, apapun yang dilaksanakan oleh PKK kami selalu mendorong, membantu, semua kegiatan karena ini adalah sebuah tanggungjawab dari PKK desa untuk dilaporkan ke tingkat PKK di atasnya. Bagaimanapun perangkat desa dan perempuan, perangkat desa dan PKK tidak terlepas dan apapun kegiatan yang dibawa dari perempuan, dari PKK desa, perangkat desakan sifatnya hanya membantu, sifatnya mengakomodir, sifatnya memberikan pelayanan juga. Ini salah satu pelayanan di desa untuk kegiatan perempuan di wilayah terutama untuk di PKK, kita selalu memperhatikan” (wawancara, Supendi, 27 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kerjasama antara PKK desa dan perangkat desa. Mereka aktif berkomunikasi dan berunding, serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama perangkat desa. PKK desa diakui memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melaporkan semua kegiatan di desa ke tingkat PKK di atasnya. Dalam konteks ini, perangkat desa bersifat membantu, mengakomodir, dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang dibawa oleh perempuan dan PKK desa. Pendekatan ini mencerminkan perhatian yang diberikan terhadap kegiatan perempuan di wilayah desa, khususnya dalam konteks PKK.

Selain dengan perangkat desa, PKKpun dalam mengadvokasikan programnya tersebut juga bekerjasama dengan lembaga lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Selain itu, ya paling kerja sama dengan Kadus, LPM, dan lain sebagainya. Seperti semisal kita mau turun ke masyarakat itu kita ada kerjasama juga dengan pihak perangkat lingkungan di masyarakat itu. Kami ada juga kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga lain dalam menjalankan program-program PKK” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut mencerminkan kerjasama yang erat antara PKK dengan perangkat desa, termasuk komunikasi rutin, evaluasi bersama, dan kolaborasi dengan pihak lingkungan. Selain itu, ada kerjasama dengan Kadus, LPM, dan pihak masyarakat dalam turun langsung ke lapangan. Keseluruhan menunjukkan upaya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi atau lembaga lain, untuk menjalankan program-program PKK atau kegiatan sosial.

Adapun strategi PKK dalam mengadvokasi program mereka ke masyarakat itu ialah dengan dilakukannya penyuluhan ataupun sosialisasi di setiap kegiatan kemasyarakatan seperti Posyandu maupun pengajian. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kita biasanya melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke masyarakat semisal pada saat ada kegiatan di masyarakat seperti Posyandu, pengajian ta’lim, ataupun gotong royong. Kalo gak gitu ya paling kerja sama dengan perangkat lingkungan kaya RT/RW atau ya kader Posyandu di lingkungan gitu buat menghubungi para warganya untuk mengikuti kegiatan yang sedang PKK jalankan” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PKK mengadvokasikan programnya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama saat ada kegiatan di masyarakat seperti Posyandu, pengajian ta’lim, atau gotong royong. Selain itu, PKK juga bekerja sama dengan perangkat lingkungan seperti RT/RW atau kader Posyandu untuk menghubungi warga dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dijalankan oleh PKK. Pendekatan ini mencerminkan upaya PKK untuk terlibat langsung dengan masyarakat, memberikan informasi, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembangunan. Hal inipun dikonfirmasi oleh Ibu Marmi selaku Kader Posyandu:

“Biasanya kita dihubungi kalo ada program apa gitu dari PKK itu kaya semisal lewat *group WA* gitu, kaya kemarin ada kegiatan pelatihan posyandu di kecamatan itu dikasih tau lewat *WA*” (wawancara, Marmi, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa biasanya pemberitahuan atau koordinasi terkait program-program PKK disampaikan melalui *WhatsApp (WA) Group*. Contohnya, informasi tentang kegiatan pelatihan Posyandu di kecamatan dikomunikasikan melalui pesan di *WhatsApp*. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efisien kepada anggota PKK atau pihak terkait.

Adapun dalam mengadvokasikan program-programnya tersebut PKK masih mengalami beberapa kendala di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurhayati selaku Ketua Pokja 1 PKK Desa Cileungsi:

“Ya banyak hambatan mah banyak, kadang masyarakat itu memang masih sulit untuk di ajak gotong royong semisal saat kegiatan jumsihat atau minggu sehat itu masih sulit itu kendalanya” (wawancara, Nurhayati, 11 Juli 2023).

Hal inipun dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Banyak tantangannya neng, kadang kita mau sosialisasi aja itukan ada yang tolak. Kita bicara begini *‘ahh, ceunah’* gitu tuh ngomongnya, kita ajak gotong royong aja terkadang mereka bilang *‘haduh, udah ah nanti besok juga dibersihin bu’*. Nah gitu, banyak tantangannya neng, pokoknya jadi PKK itu ya harus tebal muka, tebal telinga gitu. Selain masyarakatnya itu, tantangan lainnya itu ya biaya” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyampaikan beberapa hambatan dalam menjalankan kegiatan PKK, termasuk kesulitan mengajak masyarakat gotong royong, tantangan sosialisasi dan komunikasi, serta kendala biaya. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi PKK untuk memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan kemampuan adaptasi untuk mencapai tujuan kegiatan dengan sukses.

Selain dalam kegiatan gotong royong, ada beberapa kegiatan yang mengalami beberapa kendala seperti Paaredi, UP2K/UMKM, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi :

“Hambatannya masih banyak, mereka masih belum paham tentang paaredi. Terus terang, Cileungsi ini tuh belum paham untuk kegiatan yang begini-begini tuh belum paham. Jadi intinya *‘ahh kajeun teuinglah budak ieu’* gitu, jadi seakan-akan teh katanya *‘biarin ah itu mah urusannya anak muda’* gitu neng” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemahaman masyarakat terhadap kegiatan Paaredi. Secara umum, masyarakat di Cileungsi dianggap belum sepenuhnya memahami atau mendukung kegiatan yang bersifat baru atau tidak familiar. Ada persepsi bahwa kegiatan tersebut dianggap kurang penting atau dianggap sebagai urusan anak muda yang sebaiknya dibiarkan begitu saja. Pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpahaman dan mungkin sikap acuh terhadap kegiatan tersebut.

Selain itu, ada pula tantangan lain yaitu dalam kegiatan UP2K ataupun UMKM. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi :

“Selama ini UMKMnya masih belum berjalan dengan pesat, masih ada ragu-ragu, atau mempunyai UMKM tersendiri tetapi tidak pembukuan, terus terkadang mereka ini menganggap sepele dengan keadminisitrasian itu. cuma karena masyarakat itu tadi simpan pinjamnya itu kita kasih modalkan, kita kasih modalnya udah dulu cuma gak pemulangan jadi tidak balik modal. Alasannya karena mereka merasa itu adalah duit pemerintah ini jadi mereka tidak merasa harus mengembangkannya. Tetapi itu gak semua pelaku usaha demikian, jadi masih ada yang berhasil” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa sektor UMKM di wilayah tersebut menghadapi tantangan, seperti pertumbuhan yang lambat, kurangnya pembukuan, sikap meremehkan administrasi, dan kendala dalam pemberian modal. Beberapa pelaku usaha merasa tidak perlu mengembangkan usahanya karena menganggap modal yang diberikan oleh pemerintah adalah hak mereka. Meski demikian, ada pelaku usaha UMKM yang tetap berhasil mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya dipaparkan juga oleh Ibu Mugiyanti, mengenai tantangan lainnya yang dihadapi oleh PKK Desa Cileungsi:

“Kesulitan di Cileungsi itu terkadang masyarakatnya yang masih gak mau mengikuti program pemerintah. Semisal rata-rata beberapa orang menolak untuk melakukan KB itu mereka merasa jika melakukan KB itu mereka artinya menolak rezeki, lalu ada juga yang menolak untuk vaksin karena katanya vaksinnya itu tidak halal. Kita masih sulit untuk mengklopkan antara dua pemikiran itu sulit. Masyarakatnya juga terkadang masih belum paham banget terhadap program PKK itu sebenarnya apa itu masih kurang. Ya itu aja, terkadang walaupun kita gembor-gembor ya belum paham, itu saja” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Pernyataan tersebut menyebutkan beberapa kesulitan di Cileungsi, seperti penolakan terhadap program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB) karena dianggap menolak rezeki, serta penolakan vaksinasi dengan alasan kehalalan. Ada kesulitan dalam menyatukan pemikiran yang berbeda dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PKK. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, pemahaman masyarakat masih terbatas, menciptakan tantangan dalam implementasi program-program tersebut.

Dari semua pemaparan mengenai tantangan yang dihadapi PKK Desa Cileungsi dalam mengadvokasikan program-programnya itu, rata-rata tantangannya itu muncul dari masyarakatnya. Hal inipun dikonfirmasi oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Hambatan itu pasti ada. Kendala-kendala utamanya ya itu kembali lagi, kadang kita bersikap ataupun misalkan kita mengeluarkan sikap yang misalnya mau memberitahu itu terkadang masih dihalang-halangi oleh keluarganya. Yaa sudah tau jelas salah, tapi masih dibela padahal sudah jelas salah yaa. Masih ada ikatan kalimat yang begini nih mba *‘masih sodara, kasihan’* nah gitu. Itu yang pertama nah itu hambatannya kadang-kadang kita mau bertindak apa, dari pihak keluarganya jugakan kadang-kadang susah” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terdapat hambatan dalam melakukan tindakan atau memberikan informasi tertentu, terutama karena adanya kendala dari keluarga. Meskipun sudah jelas bahwa tindakan tersebut salah, namun terkadang mendapat halangan dari keluarga yang masih membela. Ada juga ikatan emosional seperti pertalian keluarga yang dapat menjadi hambatan dalam mengambil tindakan atau memberikan informasi yang seharusnya diambil. Tantangan utama mungkin terletak pada kesulitan dalam mengatasi resistensi atau pembelaan keluarga terhadap tindakan yang dianggap tidak benar.

Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya masih ada hambatan lain yang dialami. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Terus perempuan itu biasanya sebagian orang itu menganggap perempuan itu kurang ada andil, padahal banyak andilnya perempuan yang membikin segala program itu bisa terlaksana ya memang kembali lagi, kalo hambatannya itu ke masyarakatnya sendiri sih. Cuma kalo saya melihat sedikit demi sedikit dan tidak semua desa, ya ada beberapa desa yang sudah mulai dia memberikan apresiasi bahwa perempuan itu bukanlah cuma perempuan yang cuma kurang kerjaan tapi perempuan yang memang banyak banget kerjanya, apalagi di PKK ini ya, jadi lebih banyaklah untuk berfokus ke sosialnya, pemberdayaan perempuannya, terus kesejahteraan keluarga juga, kesehatan juga, semua bidang itu dipegang oleh peranan wanita kebanyakan yah. Masih ada yang berpikiran bahwa perempuan itu gak bisa apa-apa, tapi itu semua salah. Justru dengan adanya wanitalah yang asalnya rumah jelek sejelek apapun bisa rapih dan kitanya bisa nyaman tinggal disitu, terus untuk urusan gizi makanan segala macam yang lebih fokus siapa? Wanita, nah di situlah peranan wanita. Saya sering menggaungkan kepada PKK Desa saat ini, saya menginginkan ibu ketua PKK untuk mempunyai kualitas. Dengan cara apa? Dengan cara aktif yang pertama lalu yang kedua itu belajar, belajar, belajar. Seperti tadi, belajar berbicara di depan umum, terus belajar memaparkan hasil dari

kegiatan selama ini yang sudah dilakukan itu apa saja. Cuma kalo untuk yang intinya ya balik lagi saya bilang, tergantung dari si wilayahnya sendiri yah” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa masih ada pandangan negatif terhadap peran perempuan, walaupun sebenarnya perempuan memiliki andil besar dalam program-program, terutama di PKK. Beberapa desa mulai memberikan apresiasi terhadap peran perempuan, namun pandangan negatif masih ada. Perempuan di PKK banyak fokus pada aspek sosial, pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dan pembelajaran dianggap kunci untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan di PKK.

Dari pernyataan-pernyataan mengenai tantangan yang dialami PKK Desa Cileungsi, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang mereka alami ialah bersumber dari masyarakatnya. Masih banyak masyarakat yang belum bisa kooperatif dalam program-program yang dijalankan PKK. Selain itu, kendala lainnya ada di pembiayaan dan pandangan negatif beberapa masyarakat mengenai peranan perempuan.

PKK sebagai lembaga masyarakat yang mewakili perempuan, melalui proses advokasi yang tidak mudah. Beberapa program yang diharapkan mampu untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, mengalami beberapa kendala baik secara finansial maupun dari kurangnya kesadaran dari masyarakat. Penulis kemudian berusaha menelusuri lebih lanjut tentang upaya yang dilakukan PKK Desa Cileungsi dalam melakukan advokasi melalui sudut pandang *political advocacy*. Meminjam pendapat Richey dan Taylor (2021), advokasi politik diartikan sebagai upaya warga negara untuk menguraikan keyakinan mereka mengenai kandidat atau isu-isu tertentu melalui dialog untuk membuat seseorang berubah. Hal ini berarti PKK Desa Cileungsi dikatakan melakukan advokasi apabila mereka melakukan upaya untuk mempengaruhi orang lain, baik pemerintah desa maupun masyarakat, guna mencapai tujuan PKK dalam lingkup ketahanan sosial.

Richey dan Taylor kemudian memberikan beberapa aspek yang harus ditelaah. Pertama, kondisi dimana persaingan politik di tingkatan makro terjadi. Apabila dikaitkan dengan konteks PKK di Desa Cileungsi, maka perangkat desa adalah subjek yang menjadi pembahasan dalam tingkatan makro. Hal ini dikarenakan program-program yang diusulkan oleh PKK memerlukan persetujuan terkait program prioritas yang ditentukan oleh pemerintah desa. Salah satu pertimbangannya adalah terkait alokasi biaya dalam program PKK serta urgensi dari suatu program bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Richey dan Taylor (2021) bahwa advokasi lebih mungkin terjadi apabila lingkungan makro politik sedang kompetitif, dimana kondisi pemerintahan Desa Cileungsi memiliki program prioritas dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, terlihat bahwa PKK Desa Cileungsi memperjuangkan aspirasi program mereka melalui jalur formal yakni musdes dan musrenbangdes, serta melalui jalur informal berupa melobi atau dapat dikatakan dengan menjalin komunikasi secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa Perangkat Desa yang lain.

Kedua, kondisi dimana jarak sosial atau *social distance* dapat dinilai pada tingkatan menengah. Advokasi adalah suatu kegiatan yang berpotensi memunculkan konflik, sehingga perlu untuk mempertimbangkan dua aspek berikut yaitu, seberapa besar konflik yang terjadi ketika orang melakukan advokasi dan kita perlu menguraikan sejauh mana komposisi jaringan dan kekuatan ikatan pribadi terhadap hal yang diadvokasi (Richey dan Taylor, 2021). PKK sebagai advokat melakukan interaksi dengan perangkat desa dan masyarakat. Terkait hubungannya dengan perangkat desa, PKK tidak mengalami kendala dalam aspek *social distance* karena perangkat desa mendukung dan memfasilitasi PKK Desa Cileungsi untuk melaksanakan program, walaupun harus ditentukan prioritasnya terlebih dahulu. Meminjam pendapat Richey dan Taylor dalam melihat aspek *social distance*, orang-orang yang dapat diajak advokasi mungkin bukan orang-orang terdekat (misalnya keluarga) atau orang yang paling jauh (misalnya orang asing), melainkan orang-orang yang berada di antara keduanya. Hal inilah yang memungkinkan

advokasi politik bisa terjadi. Namun di sisi lain, Richey dan Taylor juga menyebutkan bahwa hubungan yang sangat dekat juga mempunyai “*spiral of silence*” karena hubungan ini terlalu berharga untuk dirusak oleh perselisihan politik. Hal ini ditunjukkan melalui hubungan PKK dalam mengadvokasi program kepada masyarakat. PKK mengalami hambatan dalam melakukan tindakan atau memberikan informasi tertentu, terutama karena adanya kendala dari keluarga. Meskipun sudah jelas bahwa tindakan tersebut salah, namun terkadang mendapat halangan dari keluarga yang masih membela. Ada juga ikatan emosional seperti pertalian keluarga yang dapat menjadi hambatan dalam mengambil tindakan atau memberikan informasi yang seharusnya diambil. Tantangan utama mungkin terletak pada kesulitan dalam mengatasi resistensi atau pembelaan keluarga terhadap tindakan yang dianggap tidak benar. Sebuah tembok “*spiral of silence*” yang tidak ingin dirusak oleh perselisihan politik.

Ketiga, faktor individu yang dilihat dari segi kepentingan, keterlibatan, keberpihakan negatif, dan kepribadian pada tingkatan mikro. Dalam konteks PKK Desa Cileungsi, proses mengadvokasi program pada masyarakat diwarnai oleh keberpihakan negatif berupa sikap acuh dari masyarakat yang tidak mau menerima maupun melaksanakan program dari PKK itu sendiri. Minimnya keterlibatan dan kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap perubahan inilah yang membuat proses advokasi menjadi tidak mudah.

BAB V

DAMPAK ADVOKASI PKK TERHADAP PROGRAM

KETAHANAN SOSIAL

Program ketahanan sosial merupakan suatu upaya strategis dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Advokasi terhadap program ini memiliki dampak signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih tangguh, seimbang, dan berkeadilan. Program ketahanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketidaksetaraan, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai dampak advokasi program ketahanan sosial akan menyoroti berbagai aspek, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Advokasi program ketahanan sosial dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Dalam beberapa konteks, kelompok-kelompok seperti PKK Desa atau instansi sejenis dapat turut berperan dalam mempromosikan dan mengimplementasikan program ketahanan sosial di tingkat desa. Melalui upaya advokasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang signifikan dan terus berkembang dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi dampak-dampak yang terjadi akibat advokasi program ketahanan sosial. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana advokasi program ketahanan sosial menjadi elemen kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

Adapun dampak-dampak dari advokasi program ketahanan sosial yang dilakukan oleh PKK Desa Cileungsi sebagai berikut:

1. Aspek Pendidikan dan Kesehatan

Dalam aspek pendidikan, salah satu aspirasi yang disampaikan oleh PKK ialah program Paaredi. Program ini hadir lantaran di era digital ini, anak-anak itu lebih mudah mengakses internet untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Sehingga pergaulan anak-anak terkhusus remaja itu sangat harus diperhatikan oleh orang tuanya agar para anak ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dampak dari Paaredi di Desa Cileungsi ini sendiri belum terlalu dirasakan, hal ini lantaran program ini baru ditahap penyuluhan saja. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi:

“Kalau untuk saat ini, Paaredi itu baru hanya semacam sosialisasi saja mba, biasanya sosialisasinya tuh lebih ke di posyandu, karena banyak orang datang itukan ya ke posyandu. Terus yang kedua itu majlis taklim” (wawancara, Hesti, 23 Juni 2023).

Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kegiatannya itu memang belum kita jalankan secara penuh, sejauh ini baru penyuluhan. Untuk penyuluhannya itu kita melalui posyandu dan melalui BKR itu sendiri. Inti penyuluhannya itu agar orang tua itu peduli dengan era digital ini” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Program Paaredi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek pendidikan di Desa Cileungsi.

Selain dalam aspek pendidikan, dalam hal inipun dijelaskan pula dampak lain dari advokasi PKK terhadap ketahanan sosial dalam aspek kesehatan. Dalam kesehatan untuk dampaknya itu telah cukup dirasakan dengan baik. Hal ini dibuktikannya dengan diadakan rutin kegiatan imunisasi ataupun pemeriksaan kesehatan baik untuk anak-anak, ibu hamil, maupun para lansia. Selain itu PKK juga mengadakan kegiatan Pelatihan Kader Posyandu, dimana dalam pelatihan kader Posyandu, kegiatan-kegiatan melibatkan pendidikan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, penanggulangan gizi buruk, pemantauan pertumbuhan balita, pencegahan penyakit menular, keterampilan komunikasi, manajemen Posyandu, simulasi kasus, dan pengembangan tim kerja. Para kader dilatih untuk memberikan informasi tentang perawatan ibu hamil, gizi yang baik, dan imunisasi, sambil meningkatkan keterampilan dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat, pengukuran berat dan tinggi badan, serta penanganan gizi buruk. Pelatihan juga mencakup aspek manajerial, termasuk administrasi Posyandu dan pengelolaan sumber daya. Melalui simulasi kasus, kader diajarkan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan yang mungkin timbul, sementara keterampilan komunikasi dan pengembangan tim kerja bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kesehatan dasar di tingkat komunitas. Hal inipun dikonfirmasi oleh Ibu Marmi selaku Kader Posyandu Desa Cileungsi:

“Ya dengan adanya kegiatan pelatihan ini itu sangat bermanfaat buat kami sebagai kader posyandu, soalnya dengan adanya kegiatan ini kita tuh jadi tau bagaimana penanganan pada saat kegiatan posyandu, dari mulai pemeriksaan hingga pendataan” (wawancara, Marmi, 11 Juli 2023).

Selain Ibu Marmi selaku Kader Posyandu Desa Cileungsi yang merasakan dampak baik dari adanya kegiatan dalam aspek kesehatan, hal inipun diakui oleh Ibu Nurlaeli selaku perwakilan perempuan sebagai berikut:

“Dari kegiatan kesehatan sendiri itu sudah cukup terasa Mba” (wawancara, Nurlaeli, 27 November 2023).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek kesehatan sudah mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan kader posyandu.

2. Pemberdayaan Perempuan dalam Bingkai Pertumbuhan Ekonomi Desa

Program ketahanan sosial yang diadvokasi oleh PKK mencakup upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, dan upaya pemberdayaan perempuan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi perempuan di Desa Cileungsi ialah beberapa dari mereka masih bergantung dengan laki-laki. Dalam menanggapi hal tersebut PKK melakukan program pelatihan perempuan, dengan adanya program ini diharapkan perempuan di Desa Cileungsi dapat lebih mandiri. Adapun dalam program pelatihan perempuan di Desa Cileungsi, kegiatannya adalah UP2K dan juga Pelatihan UMKM. UP2K sendiri ialah suatu usaha dalam peningkatan pendapatan keluarga, untuk mewujudkan hal tersebut PKK Desa Cileungsi mengadakan pelatihan-pelatihan kepada perempuan khususnya untuk memberdayakan diri perempuan dalam lingkup UMKM. Adapun kegiatan untuk mewujudkan hal ini, PKK Desa Cileungsi melakukan beberapa pelatihan untuk perempuan dalam mengembangkan keterampilannya seperti, menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya.

Gambaran mengenai dampak dijelaskan oleh Ibu Nurlaeli selaku RW Desa Cileungsi sekaligus perwakilan perempuan yang ikut terlibat dalam program-program PKK Desa Cileungsi:

“*Alhamdulillah* ya karena selalu dilibatkan dalam segala hal kita sebagai kaum perempuan jadi dapat merasakan keberhasilan atau kemudahan yang di fasilitasi desa, seperti dari praktek-praktek pembuatan kue kita bisa bikin UMKM hasil belajar dipraktekin hasilnya di jual jadi dapat meningkatkan ekonomi keluarga” (wawancara, Ibu Nurlaeli, 27 November 2023).

Dapat disimpulkan bahwa PKK melalui programnya dapat memberikan pelatihan kepada perempuan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Cileungsi.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

PKK dalam mengadvokasikan program perlu untuk melibatkan masyarakat agar program tersebut dapat terwujud. Namun, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang bersifat acuh terhadap program yang diberikan. Salah satunya ialah pada saat PKK mengadakan gotong royong yang dilakukan seperti kegiatan Jumsihat ataupun Minggu sehat, terkadang masih ada masyarakat yang sulit untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Ibu Nurhayati selaku Ketua Pokja I PKK Desa Cileungsi:

“Ya banyak hambatan mah banyak, kadang masyarakat itu memang masih sulit untuk di ajak gotong royong semisal saat kegiatan Jumsihat atau Minggu sehat itu masih sulit itu kendalanya” (wawancara, Nurhayati, 11 Juli 2023).

Sikap acuh masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang teori Rhicey dan Taylor bahwa pada tingkat mikro, keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya advokasi. Pada kasus ini masyarakat dapat dikatakan tidak terlibat dengan kegiatan yang dilakukan PKK, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat minim akan keterlibatan.

Selain itu, faktor kedua yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat pada konteks program pemerintah yakni sosialisasi KB. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Mugiyanti selaku Sekertaris PKK Desa Cileungsi:

“Kesulitan di Cileungsi itu terkadang masyarakatnya yang masih gak mau mengikuti program pemerintah. Semisal rata-rata beberapa orang menolak untuk melakukan KB itu mereka merasa jika melakukan KB itu mereka artinya menolak rezeki, lalu ada juga yang menolak untuk vaksin karena katanya vaksinnya itu tidak halal. Kita masih sulit untuk mengklopkan antara dua pemikiran itu sulit. Masyarakatnya juga terkadang masih belum paham banget terhadap program PKK itu sebenarnya apa itu masih kurang. Ya itu aja, terkadang walaupun kita gembor-gembor ya belum paham, itu saja” (wawancara, Mugiyanti, 11 Juli 2023).

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga terdapat dua alasan mengapa tingkat partisipasi masyarakat dikatakan rendah. Pertama ialah sikap acuh dari masyarakat lalu yang kedua karena kurangnya pemahaman. Dalam hal ini, secara garis besar dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Cileungsi terhadap program tergolong rendah.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa program-program PKK di Desa Cileungsi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan. Pada tingkat partisipasi masyarakat, masih terdapat hambatan seperti sikap acuh dan kurangnya pemahaman terhadap program-program yang diadvokasi oleh PKK. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi dan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan sosial tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Aspirasi PKK Desa Cileungsi antara lain terbagi menjadi tiga aspek yakni, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Dalam aspek pendidikan, PKK memiliki program-program seperti Paaredi, pembentukan PAUD, sosialisasi Gemar Membaca, dan Cinta Kasih. Lalu dalam aspek Kesehatan, PKK memiliki beberapa program seperti pembentukan ketahanan pangan, penyuluhan B2SA, pelatihan kader posyandu, gotong royong, dan pemeriksaan IVA Test terhadap WUSPUS. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, PKK memiliki beberapa program seperti pembinaan UP2K, pelatihan pengelolaan UMKM, serta mengadakan pelatihan perempuan.
2. Strategi yang dilakukan PKK Desa Cileungsi dalam mengadvokasikan program-programnya melalui *political advocacy* dengan memperjuangkan program-programnya melalui jalur formal dan informal, seperti musdes dan menjalin komunikasi secara langsung dengan perangkat desa.
3. Adapun dampak dari advokasi program ketahanan sosial yang dilakukan oleh PKK Desa Cileungsi terbagi dalam tiga aspek, yaitu pendidikan, pemberdayaan perempuan dalam bingkai pertumbuhan ekonomi desa, dan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam aspek pendidikan, salah satu programnya ialah Paaredi, dalam hal ini belum memberikan dampak signifikan dalam aspek pendidikan, sedangkan dalam aspek kesehatan sudah mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan kader posyandu. Di aspek pemberdayaan perempuan dalam bingkai pertumbuhan ekonomi desa terdapat program pelatihan perempuan, seperti UP2K dan pelatihan UMKM, pada program ini sudah

berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian perempuan di desa. Namun, dalam aspek tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena beberapa hambatan seperti sikap acuh dan kurangnya pemahaman terhadap program PKK. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa program-program PKK di Desa Cileungsi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk PKK Desa Cileungsi, disarankan memperluas dan memperkuat programnya dengan mengidentifikasi kebutuhan tambahan. Tingkatkan keterlibatan masyarakat melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan forum partisipatif untuk memastikan program PKK mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. PKK perlu memperkuat strategi advokasi untuk mendukung programnya dan mengembangkan rencana keberlanjutan. Lakukan evaluasi dan pemantauan rutin untuk mengukur dampak, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan memastikan program sesuai tujuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PKK Desa Cileungsi dapat lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

2. Untuk Pemerintah Desa Cileungsi, sebaiknya terus mengembangkan program pemberdayaan, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, dengan melibatkan kolaborasi lembaga terkait. Diperlukan perkuatan program keamanan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui kerjasama dengan kepolisian dan kampanye anti-narkoba di sekolah. Peningkatan dukungan untuk PKK Desa Cileungsi dan penguatan komunikasi dengan masyarakat perlu diutamakan, termasuk evaluasi rutin untuk mengukur dampak program. Selain itu, dukung pemberdayaan ekonomi desa melalui program UMKM untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Cileungsi dapat lebih efektif mengatasi tantangan ketahanan sosial dan mencapai perkembangan berkelanjutan.
3. Untuk masyarakat, perlu tingkatkan partisipasi dalam program desa dan kesadaran terhadap peran mereka dalam mendukung ketahanan sosial. Aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk meningkatkan keberdayaan finansial dan pemahaman terhadap resiko *gadget* serta kenakalan remaja. Ikut serta dalam evaluasi dampak program desa untuk mengukur peningkatan kesejahteraan, partisipasi, pendidikan, dan kesehatan. Dukung program-program yang memberikan dampak positif pada pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ade Latifa, d. (2019). *Ketahanan Sosial Keluarga Migran Miskin Perkotaan Pada Era Pemberlakuan SJSN*. Jakarta: LIPI Press.
- Adger. (2000). Social and Ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography.
- Ahmadi, A. (2007). *Psikologi Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alie, A., & Elanda, Y. (2019). Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rangkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 31-42.
- Andayani, A. A., Martono, E., & Muhammad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Antara News*. (2018, September 14). Dipetik Maret 25, 2023, dari Mengeluarkan Perempuan dari Kelompok Rentan: <https://www.antaraneews.com/berita/748216/mengeluarkan-perempuan-dari-kelompok-rentan>
- Asmi Ayuning Hidayah, d. (2021). Peran Aktif Kader PKK Melalui Wirausaha Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga. *Jurnal Masyarakat Mandiri*.
- Betke, F. (2002). *Statistik Sosial, Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusbangtansosmas.
- Carl Folke, d. (2002). Resilience and sustainable development: Building adaptive capacity in a world of transformations. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*.

- Citra Sandhika Putri, O. J. (2020). Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo.
- Community & Regional Resilience*. (2013). Dipetik Maret 25, 2023, dari Definitions of Community Resilience: An Analysis: <http://www.resilientus.org/wp-content/uploads/2013/08/definitions-of-community-resilience>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Prestasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Daud Bahransyaf, R. P. (2013). Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model. *Jurnal PKS*.
- Ghafur, M. F. (2018). Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233-247.
- Kemendagri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta.
- Kemendagri. (2020). *Peraturan Kemendagri No 30 Tahun 2020 Bab 3 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK*. Jakarta.
- Kemendagri. (2020). *Peraturan Kemendagri No 30 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Tentang Tugas dan Fungsi PKK*. Jakarta.
- Leitch, L. (2023, Maret 25). *An introduction to the Social Resilience Model*. Diambil kembali dari Threshold Global Works: <https://www.thresholdglobalworks.com/about/social-resilience/>
- Markus Keck, P. S. (2013). What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward. *Bonn: Erdkunde*. Diambil kembali dari Bonn: Erdkunde.
- Mukharrom, M. T. (2015). Teologi Advokasi. *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*.

- Nikma Wahyuni Hanis, A. M. (2020). Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Nyi R. Irmayani, d. (2021). *Kebijakan Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- PKK, T. P. (2010). *Hasil Rapat Kerja Tahunan Nasional VII PKK Tahun 2010*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Ramli, d. (2023). *Konsep dan Advokasi Kesehatan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sean Richey, J. B. (2021). *Political Advocacy and American Politics: Why People Fight So Often About Politics*. Newyork: Routledge.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang . *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Silahudin, S. L. (2022). Potret Ketahanan Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Hadapi Covid-19 Bagian Integral Ketahanan Nasional. *Jurnal Aspirasi*.
- Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stevany Afrizal, d. (2020). Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19. *Untirta Civic Education Journal*.
- Steve Carpenter, d. (2001). From Metaphor to measurement: Resilience of what to what? *Ecosystems*.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Refika Aditama.
- Susi Handayani, L. B. (2019). Program Kemitraan Masyarakat Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli.

- Syaron Brigitte Lantaeda, d. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Tadanugi, I. N. (2020). Peranan PKK terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administrasie*.
- Wulandari, N., Indrianti, D. T., & Hilmi, M. I. (2022). Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 52-60.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian di Desa Cileungsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1566/Un.10.6/K/KM.05.01/06/2023 Semarang, 19 Juni 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pemerintah Desa Cileungsi
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial untuk Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfa Maharani
NIM : 1906016025
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Bogor, 8 Mei 2001
CP/e-mail : 085804130215/silfamaharani28052001@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Yusep Yasmin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Kaum RT. 01 RW. 02 Desa Cileungsi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



H. A. Gunawan, S. Ag, M. H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Izin Penelitian di PKK Desa Cileungsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1566/Un.10.6/K/KM.05.01/06/2023 Semarang, 19 Juni 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
PKK Desa Cileungsi
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Peran Politik PKK dalam Mengadvokasi Program Ketahanan Sosial untuk Perempuan dan Anak-Anak di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Silfa Maharani
NIM : 1906016025
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Bogor, 8 Mei 2001
CP/e-mail : 085804130215/silfamaharani28052001@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Yusep Yasmin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Kaum RT. 01 RW. 02 Desa Cileungsi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Sub Bag. Akademik, Kemahasiswaan
Alumni
H. A. Gunawan, S. Ag, M. H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Foto Wawancara Dengan Narasumber Penelitian



Foto bersama Ibu Hesti selaku Ketua PKK Kecamatan Cileungsi, 23 Juni 2023



Foto bersama Sekertaris dan Anggota PKK Desa Cileungsi, 11 Juli 2023



Foto bersama Ibu Reni selaku Anggota PKK Desa Cileungsi, 2 Agustus 2023



Foto bersama Pelaku UMKM Posyandu Desa Cileungsi, 23 Juni 2023



Foto bersama Ibu Hj. Luli selaku Anggota BPD Desa Cileungsi, 23 Juni 2023



Foto bersama Bapak Supendi selaku Sekertaris Desa Cileungsi, 27 Juni 2023



Foto bersama Kader Posyandu beserta Bidan Puskesmas Desa Cileungsi, 11 Juli 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silfa Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 8 Mei 2001
Alamat : Kp. Kaum Rt.001/Rw.002, Desa
Cileungsi, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
NIM : 1906016025
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.70
Agama : Islam
Email : silfamaharani28052001@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 085804130215



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA/TK Al - Ikhlas (2006 – 2007)
2. SD Negeri 01 Cileungsi (2007 – 2013)
3. SMP PGRI Surya Kencana (2013 – 2016)
4. SMA Negeri 02 Cileungsi (2016 – 2019)
5. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)